



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
Jalan Karja Bhakti No 54 Pasir Mas Telp (0511) 3352543 Banjarmasin



RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
2021 – 2026

DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya jualah selama ini kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah Kota Banjarmasin yang tercinta, sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin periode 2021 - 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya patutlah kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin periode 2021 - 2026 ini dapat tersusun dengan baik, khususnya kepada :

1. Walikota Banjarmasin dan Wakil Walikota Banjarmasin atas kepercayaan yang diberikan untuk membimbing dan membina Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
2. Karyawan-karyawati Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin atas ditumbuhkannya jiwa korsa dan dukungannya dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin selama ini.
3. Serta kepada pihak-pihak lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah Kebijakan dan Program serta kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada masa yang akan datang.

Wassalam.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1 Tugas, Fungsi , dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	11
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	15
2.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan	
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas perhubungan	61
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	63
3.1 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	63
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi	68
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	71
BAB IV Tujuan dan Sasaran	73
BAB 4.1 Tujuan dan Sasaran	73
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	75
BAB 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	75
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	78
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	85
BAB VIII Penutup	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dalam menata, mengatur kelancaran, keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan dan di sungai serta pengendalian manajemen operasional angkutan baik di jalan maupun di sungai.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan

tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan ekonomis, atau dengan kata lain untuk mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh agar penyediaan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi untuk urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasional jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam koordinasi pelayanan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

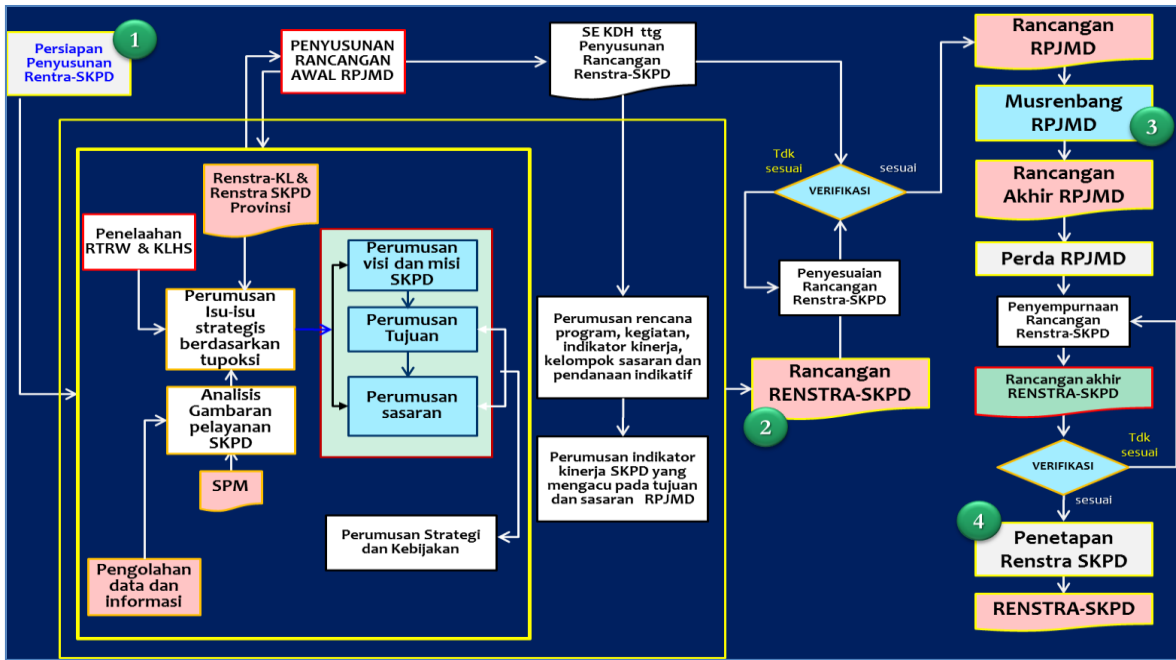
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarmasin 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarmasin diwajibkan

membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

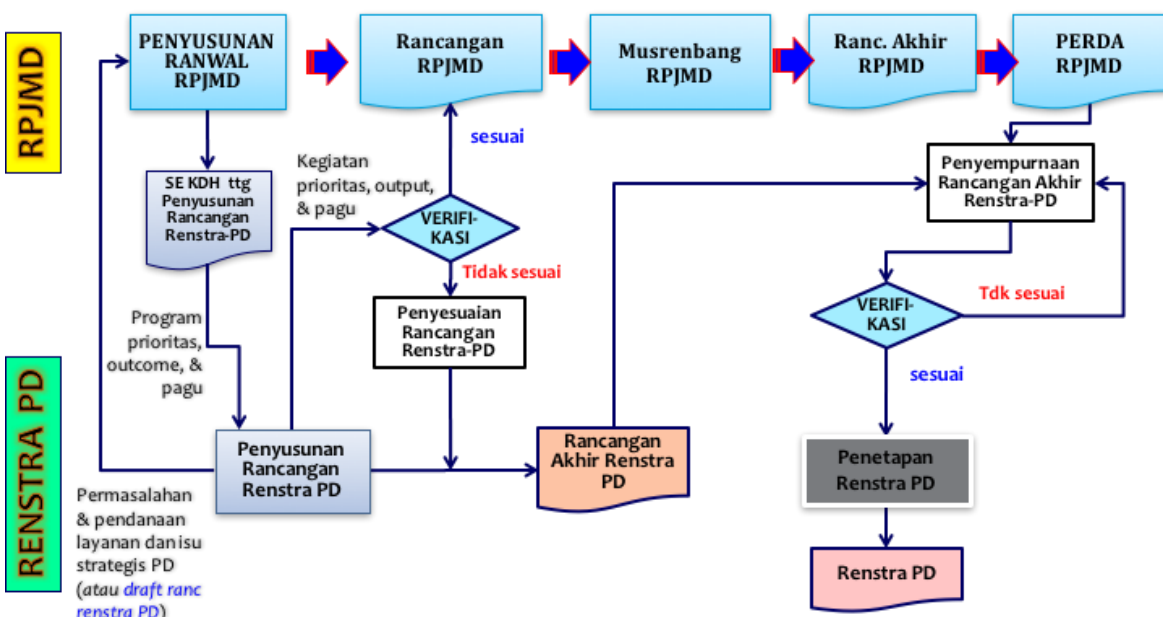
Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021-2026. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas Perhubungan selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2010

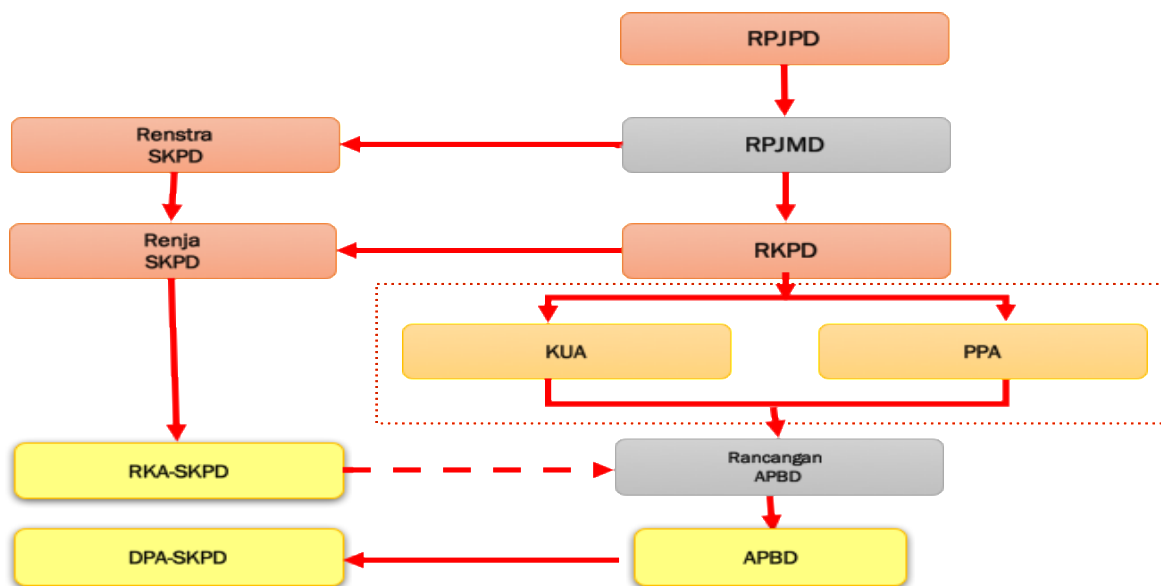
Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2017

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2021
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032;
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2026.
27. Peraturan Daerah (PERDA) No 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Walikota Banjarmasin (Perwal) Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan di Kota Banjarmasin, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang

berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, yaitu Visi Walikota Banjarmasin Sebagai Berikut :

- a. Meningkatkan Daya Saing Usaha Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Digital Serta Penguatan Industri dan Sarana Distribusi Perdagangan.
- b. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Memperkuat Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang dan Lingkungan.
- e. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sungai dan Memperkuat Nilai Budaya Banjar Dalam Sendi Kehidupan Masyarakat.
- f. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarmasin dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Perhubungan;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarmasin, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Dinas Perhubungan baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam Bidang lalu lintas, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, penataan, pengendalian manajemen lalu lintas jalan dan sungai;
2. Perumusan kebijakan teknis perbengkelan, terminal, perparkiran dan akreditasi uji kendaraan bermotor;
3. Penyelenggara, pengelola, memelihara serta pelaksana pengembangan dan peningkatan fungsi/manfaat sarana dan prasarana lalu lintas di jalan maupun di sungai;
4. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan dan di sungai;
5. Penyiapan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
6. Penyiapan, pelaksanaan, pelayanan kebutuhan dan kelayakan operasional angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis perizinan dan pengembangan di bidang perhubungan;
8. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan umum dalam Bidang lalu lintas, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian, yang terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.

- Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana angkutan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, yang terdiri dari :

- Seksi Sarana dan Kelaikan Kendaraan

Kepala Seksi Sarana dan Kelaikan Kendaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi sarana angkutan jalan.

- Seksi Sarana dan Kelaikan Kapal

Kepala Seksi Sarana dan Kelaikan Kapal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

- Seksi Prasarana

Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat.

4. Bidang Lalu Lintas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, yang terdiri dari :

- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

- Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dampak lalu lintas

- Seksi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungai

Kepala Seksi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelengkapan jalan dan sungai.

5. Bidang Angkutan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan, yang terdiri dari :

- Seksi Angkutan Orang

Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional angkutan orang, menyusun rencana penetapan trayek angkutan orang, rencana penetapan kebutuhan sarana angkutan orang dan menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan orang.

- Seksi Angkutan Barang

Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasionalisasi angkutan barang, rencana penetapan kebutuhan sarana angkutan barang, dan menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan barang.

- Seksi Angkutan LLASDP

Kepala Seksi Angkutan LLASDP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan barang di Sungai, Danau dan Penyeberangan.

6. Bidang Keselamatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina keselamatan transportasi darat, yang terdiri dari :

- Seksi Pengawasan LLAJ

Kepala Seksi Pengawasan LLAJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan lalu lintas jalan.

- Seksi Pengawasan LLASDP

Kepala Seksi Pengawasan LLASDP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

- Seksi Penyuluhan Keselamatan

Kepala Seksi Penyuluhan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan keselamatan.

Selain Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut diatas, di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terdapat 4 (empat) UPTD beserta Subbag. Tata Usaha dan satu kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari :

1. UPTD Parkir.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Parkir berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perparkiran.

2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.

3. UPTD Terminal

Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Terminal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.

4. UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan di Dermaga.

5. UPTD Penerangan Jalan Umum (PJU)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai Kepala TU yang membantu. Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyediakan, mengelola, dan memelihara Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

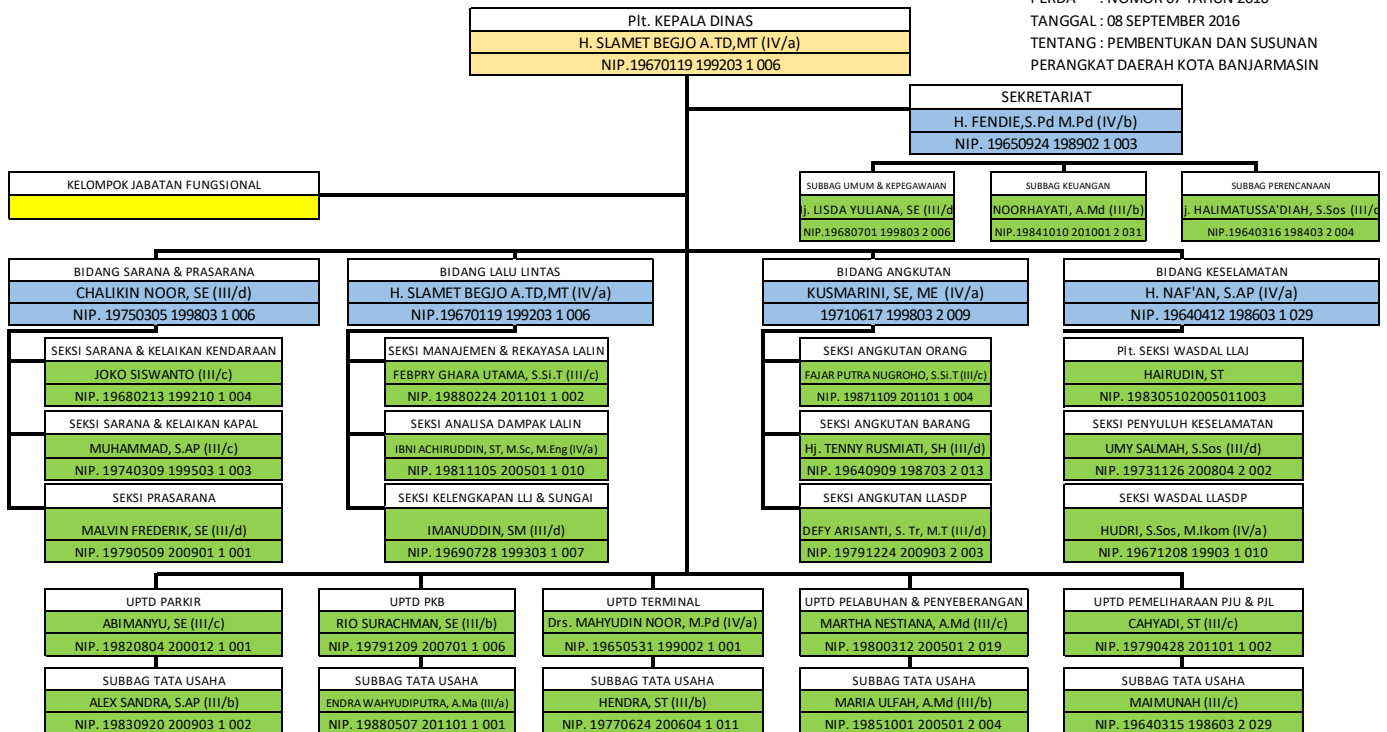
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan seperti yang tercantum Peraturan Walikota Banjarmasin No 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, meliputi:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

PERDA : NOMOR 07 TAHUN 2016
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan didukung oleh 61 pegawai yang terdiri dari 45 pegawai laki-laki dan 16 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 16 orang, golongan III sebanyak 37 orang, dan golongan IV sebanyak 7 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 2 orang, pendidikan SLTA sebanyak 13 orang, pendidikan D3 sebanyak 11 orang, pendidikan S1 sebanyak 23 orang, pendidikan S2 sebanyak 1 orang. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai (Nama PD) Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	45	73,77
		Perempuan	16	26,23
2.	Golongan	Golongan I	1	1,64
		Golongan II	16	26,23

		Golongan III	37	60,66
		Golongan IV	7	11,47
3.	Pendidikan	SD	2	3,28
		SLTA	13	21,31
		D2	2	3,28
		D3	11	18,03
		S1	23	37,70
		S2	10	16,39

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
1.	H. Slamet Begjo, A.TD, MT	Laki-laki	IV/a	Plt. Kadishub & Kabid Lalu Lintas	S2		
2	H. Fendie, S.PD, M.Pd	Laki-laki	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	S2		
3	Hj. Lisda Yulian	Perempuan	III/d	Kasubbag Umum & Kepegawaian	S1		
4	Riduan, A.Md	Laki-Laki	III/b	Pengelola Kepegawaian	D3		
5	Chotimatun Tri Utami, A.Md	Perempuan	III/b	Pengelola Kepegawaian	D3		
6	Noorhayati, A.Md	Perempuan	III/b	Kasubbag Keuangan	D3		
7	Taufikurrahman, A.Md	Laki-Laki	III/b	Bendahara Pengeluaran	D3		
8	Susanti	Perempuan	II/d	Bendahara Penerima	SLTA		
9	Hj. Halimatussa'diah, S.Sos	Perempuan	III/d	Kasubbag Perencanaan	S1		
10	Hery Saputra	Laki-laki	III/a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S1		
11	Chalikin Noor, SE	Laki-Laki	III/d	Kabid Sarana & Prasarana	S1		
12	Joko Siswanto	Laki-Laki	III/C	Kasi Sarana & Kelaikan Kendaraan	SLTA		
13	Nor Aina, A.Md, PKB	Perempuan	II/c	Pengelola Pengujian Kendaraan	D3		
14	Muhammad, S.AP	Laki-Laki	III/c	Kasi Sarana & Kelaikan Kapal	S1		
15	Malvin Frederik. SE	Laki-Laki	III/d	Kasi Prasarana	S1		
16	Febpry Ghara Utama, S.Si.T, M.T	Laki-Laki	III/c	Kasi Manajemen & Rekayasa Lalin	S2		
17	Ibni Achiruddin, ST, M.Sc, M.Eng	Laki-Laki	III/d	Kasi Analisa Dampak Lalin	S2		
18	Mega Ezma Bataviani, S.S.T (TD)	Perempuan	III/a	Pegawai Lalu Lintas Darat	S1		
19	Imanuddin, SM	Laki-Laki	III/d	Kasi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan & Sungai	S1		
20	Kusmarini, SE, ME	Perempuan	IV/a	Kabid Angkutan	S2		
21	Fajar Putra Nugroho, S. SI.T, M.T	Laki-Laki	III/c	Kasi Angkutan Orang	S2		

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
22	Candra Malau, ST	Laki-Laki	III/a	Pengawas dan Pembina Angkutan	S1		
23	Benny Saut Tarapul Marbun, A.Md, LLAJ	Laki-Laki	II/c	Pengelola Angkutan Kendaraan	D3		
24	Hj. Tenny Rusmiati, SH	Perempuan	III/d	Kasi Angkutan Barang	S1		
25	Ahmad Maslihan, S.Tr	Laki-Laki	III/a	Analisis Angkutan Darat	S1		
26	Defy Arisanti, S.Tr, M.T	Perempuan	III/d	Kasi Angkutan LLASDP	S2		
27	H. Naf'an, S.AP	Laki-Laki	IV/a	Kabid Keselamatan	S1		
28	Hairudin, ST	Laki-Laki	III/b	Plt.Kasi Wasdal LLAJ	S1		
29	Ayatullah Humaini, S.AP	Laki-Laki	III/a	Pengawas Lau Lintas Darat	S1		
30	Andy Pratama, A.Md	Laki-Laki	II/d	Pengelola Pengawasan LLAJ	D3		
31	Umy Salamah, S.Sos. M.Ikom	Perempuan	III/d	Kasi Penyuluh Keselamatan	S1		
32	Hudri, S.Sos, M.Ikom	Laki-Laki	IV/a	Kasi Wasdal LLASDP	S2		
33	Ferry Tisna Permana	Laki-Laki	II/d	Operator Speedboat	SLTA		
34	Donny Tri Wahono	Laki-Laki	II/c	Operator Speedboat	SLTA		
35	Amrullah	Laki-Laki	II/c	Operator Speedboat	SLTA		
36	Abimanyu, SE	Laki-Laki	III/c	Ka. UPTD Parkir	S1		
37	Alex Sandra S.AP	Laki-Laki	III/b	Kasubbag TU. UPTD Parkir	S1		
38	Ismiyati	Perempuan	II/d	Penagih Retribusi UPTD Parkir	SLTA		
39	Rio Surachman, SE	Laki-Laki	III/b	Kepala UPT D PKB	S1		
40	Endra Wahyudiputra, A.Ma	Laki-Laki	III/a	Kasubbag UPTD PKB	D2		
41	Maspiani	Laki-Laki	II/c	Pengadministrasi Umum UPTD PKB	SLTA		
42	Untung Teguh, ST	Laki-Laki	III/a	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	S1		
43	Muhammad Irfan, A.Ma PKB	Laki-Laki	II/b	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	D2urair		
44	Soekiman	Laki-Laki	I/c	Pengemudi	SD		
45	Drs. Mahyudin Noor, M.Pd	Laki-Laki	IV/a	Ka. UPTD Terminal	S2		
46	Hendra, ST	Laki-Laki	III/b	Kasubbag TU UPTD Terminal	S1		
47	Syalafuddin	Laki-Laki	II/d	Penagih Retribusi	SLTA		
48	Alexander Arhads	Laki-Laki	II/d	Pengadministrasi Umum	SLTA		
49	Martha Nestiana, A.Md	Perempuan	III/c	Ka. UPTD Pelabuhan & Penyeberangan	D3		

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
50	Maria Ulfah, A.Md	Perempuan	III/b	Kasubbag TU. UPTD Pelabuhan & Penyeberang	D3		
51	Agus Budiansyah, SE	Laki-Laki	III/b	Pengawas Pelabuhan	S1		
52	Deny Suma Rastiawan	Laki-Laki	II/d	Pengadministrasian Keberangkatan Kapal	SLTA		
53	Suci Amalia	Perempuan	II/d	Pengadministrasian Kedatangan Kapal	SLTA		
54	Mahlan	Laki-Laki	II/a	Pengemudi	SD		
55	Cahyadi, ST	Laki-Laki	III/b	Ka. UPTD Pemeliharaan PJU & PJL	S1		
56	Maimunah	Perempuan	III/c	Kasubbag Pemeliharaan PJU & PJL	SLTA		
57	Zainal Fauzi	Laki-Laki	III/b	Teknisi sarana & Prasarana	SMK		
58	Hairut Taqwa, A.Md	Laki-Laki	III/a	Pengelola Barang Persediaan	D3		
59	Sujito, A.Md	Laki-Laki	III/a	Pengelola Penerangan Jalan	D3		
60	Hendra Al Fajeriani, A.Md	Laki-Laki	III/a	Pengelola Penerangan Jalan	D3		
61	Ida Mulyati	Perempuan	II/c	Pemelihara Kegiatan Survey dan Perencanaan	SLTA		

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Dinas Perhubungan didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 2021

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Peralatan dan Mesin					
1.	ELEVATOR	1	√	-	-	2013
2.	Electric Generating Set	1	-	-	√	2009
3	Electric Generating Set	1	√	-	-	2011
4	Electric Generating Set	1	√	-	-	2015
5	Electric Generating Set	3	√	-	-	2019
6	Mobil Workshop	2	√	-	-	2013
7	Mobil Sedan	1	√	-	-	2015
8	Station Wagon	1	√	-	-	2001
9	Station Wagon	1	√	-	-	2005
10	Station Wagon	1	√	-	-	2008
11	Station Wagon	1	√	-	-	2015
12	Mini Bus	1	√	-	-	1997
13	Mini Bus	2	√	-	-	2012
14	Truck + Attachment	1	√	-	-	2001
15	Truck + Attachment	1	√	-	-	2014
16	Truck + Attachment	1	√	-	-	2016
17	Pick Up	1	√	-	-	2004
18	Pick Up	2	√	-	-	2008
19	Pick Up	1	√	-	-	2012
20	Pick Up	4	√	-	-	2014
21	Sepeda Motor	2	√	-	-	2002
22	Sepeda Motor	2	√	-	-	2004
23	Sepeda Motor	1	√	-	-	2005

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
24	Sepeda Motor	3	√	-	-	2006
25	Sepeda Motor	1	√	-	-	2007
26	Sepeda Motor	4	√	-	-	2008
27	Sepeda Motor	2	√	-	-	2009
28	Sepeda Motor	2	√	-	-	2010
29	Sepeda Motor	4	√	-	-	2012
30	Sepeda Motor	2	√	-	-	2014
31	Sepeda Motor	2	√	-	-	2016
32	Sepeda Motor	3	√	-	-	2017
33	Sepeda Motor	1	√	-	-	2018
34	Kapal Motor	1	√	-	-	2009
35	Speed Boat	1	√	-	-	2003
36	Speed Boat	1	√	-	-	2013
37	Speed Boat	1	√	-	-	2016
38	Speed Boat	1	√	-	-	2017
39	Perkakas Bengkel Lain Lain	1	√	-	-	2004
40	Perkakas Bengkel Service Lain Lain	1	√	-	-	2014
41	Perkakas Bengkel Service Lain Lain	1	√	-	-	2020
42	Dongkrak Mekanik	1	√	-	-	2001
43	Dongkrak Mekanik		√	-	-	2017
44	Global Positioning System	1	√	-	-	2012
45	Global Positioning System	2	√	-	-	2016
46	Global Positioning System	2	√	-	-	2019
47	Global Positioning System	12	√	-	-	2020
48	Universal Tester Lain-Lain	1	√	-	-	2014
49	Alat Ukur Lainnya	3	√	-	-	2012
50	Alat Ukur Lainnya	26	√	-	-	2016
51	Alat Ukur Lainnya	2	√	-	-	2019
52	Timbangan Jembatan Capacitas 10	1	√	-	-	2012
53	Mesin Kompresor	1	√	-	-	2017
54	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	4	√	-	-	2017
55	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	√	-	-	2020
56	Mesin Ketik manual Portable	1	-	-	√	1994
57	Mesin Ketik manual Portable	1	-	-	√	1995
58	Mesin Ketik manual Portable	1	√	-	-	2007
59	Mesin Ketik manual Portable	1	√	-	-	2008
60	Mesin Ketik manual Portable	5	-	-	√	2010
61	Mesin Ketik manual Portable	3	-	-	√	2013
62	Mesin Ketik manual Portable	1	√	-	-	2015
63	Mesin Ketik manual Portable	1	√	-	-	2016
64	Mesin Fotocopy	1	√	-	-	2007
65	Mesin Fotocopy	1	√	-	-	2013
66	Mesin Fotocopy	1	√	-	-	2020
67	Lemari Besi	1	√	-	-	1997
68	Lemari Besi	1	√	-	-	1999
69	Lemari Besi	1	√	-	-	2000
70	Lemari Besi	1	√	-	-	2002
71	Lemari Besi	1	√	-	-	2003
72	Lemari Besi	1	√	-	-	2004
73	Lemari Besi	2	√	-	-	2009
74	Lemari Besi	1	√	-	-	2010
75	Rak Besi	1	√	-	-	2009
76	Rak Kayu	1	√	-	-	2003
77	Rak Kayu	2	√	-	-	2006
78	Rak Kayu	4	-	-	√	2016
79	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	1991
80	Filling Besi/Metal	2	-	-	√	1992
81	Filling Besi/Metal	5	-	-	√	1993
82	Filling Besi/Metal	3	-	-	√	1994
83	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	1996
84	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2001
85	Filling Besi/Metal	4	√	-	-	2005
86	Filling Besi/Metal	8	-	-	√	2006
87	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2007
88	Filling Besi/Metal	3	√	-	-	2009

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
89	Filling Besi/Metal	6	-	-	√	2010
90	Filling Besi/Metal	1	√	-	-	2014
91	Peti Uang	1	-	-	-	1970
92	Peti Uang	2	√	-	-	1985
93	Peti Uang	1	-	-	-	2006
94	Lemari Kaca	1	-	-	√	2000
95	Lemari Kaca	1	-	-	√	2006
96	Lemari Kaca	2	√	-	-	2010
97	Lemari Kaca	2	√	-	-	2014
98	Lemari Kaca	1	-	-	√	2016
99	Lemari Kayu	8	-	-	√	2016
100	Lemari Pintu Kaca	3	√	-	-	2015
101	Papan Visuil	1	√	-	-	2013
102	Papan Pengumuman	1	√	-	-	2013
103	Mesin Absensi	1	√	-	-	2011
104	Mesin Absensi	1	√	-	-	2016
105	Mesin Absensi	1	√	-	-	2019
106	Mesin Kayu / Rotan	5	-	-	-	1995
107	Mesin Kayu / Rotan	1	-	-	-	1998
108	Mesin Kayu / Rotan	2	-	-	-	2000
109	Kursi Besi / Metal	1	√	-	-	2008
110	Kursi Besi / Metal	3	-	-	√	2012
111	Kursi Besi / Metal	6	√	-	-	2015
112	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	3	-	-	-	1998
113	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	2	-	-	-	2000
114	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	1	-	-	-	2006
115	Meja Rapat	2	√	-	-	2013
116	Kursi Rapat	2	√	-	-	2009
117	Kursi Rapat	19	√	-	-	2013
118	Kursi Tamu	2	-	-	-	2000
119	Kursi Tamu	4	-	-	-	2001
120	Kursi Tamu	1	-	-	-	2004
121	Kursi Tamu	1	-	-	-	2006
122	Kursi Tamu	3	-	-	-	2010
123	Kursi Putar	1	-	-	√	2000
124	Kursi Putar	1	√	-	-	2005
125	Kursi Putar	2	-	-	√	2006
126	Kursi Putar	11	√	-	-	2007
127	Kursi Putar	1	-	-	√	2010
128	Kursi Biasa	2	-	-	√	2007
129	Kursi Lipat	2	-	-	√	1994
130	Kursi Lipat	2	-	-	√	2000
131	Meja Komputer	1	√	-	-	2007
132	Meja Komputer	6	-	-	√	2008
133	Tikar	2	-	-	-	2010
134	Meja Biro	3	√	-	-	2004
135	Meja Biro	1	-	-	√	2006
136	Meja Biro	3	-	-	√	2012
137	Sofa	1	√	-	-	2006
138	Sofa	1	√	-	-	2009
139	Sofa	1	√	-	-	2012
140	Sofa	1	√	-	-	2019
141	Mesin Potong Rumput	1	-	-	√	2011
142	Lemari ES	1	√	-	-	2004
143	Lemari ES	1	-	-	√	2009
144	Lemari ES	1	√	-	-	2016
145	Lemari ES	2	√	-	-	2019
146	AC	1	-	-	-	1998
147	AC	1	-	-	√	2006
148	AC	1	√	-	-	2007
149	AC	2	√	-	-	2008
150	AC	2	√	-	-	2010
151	AC	1	√	-	-	2012

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
152	AC	4	√	-	-	2013
153	AC	2	√	-	-	2014
154	AC	2	√	-	-	2015
155	AC	4	√	-	-	2016
156	AC	4	√	-	-	2017
157	AC	2	√	-	-	2018
158	AC	10	√	-	-	2019
159	AC Split	4	-	-	√	2003
160	AC Split	1	-	-	√	2008
161	AC Split	2	√	-	-	2019
144	Kipas Angin	1	-	-	√	1995
145	Kipas Angin	1	-	-	√	1996
162	Kipas Angin	1	-	-	√	1997
163	Kipas Angin	1	-	-	√	1999
164	Kipas Angin	1	-	-	√	2000
165	Kipas Angin	1	-	-	√	2003
166	Kipas Angin	3	-	-	√	2005
167	Kipas Angin	1	-	-	√	2006
168	Kipas Angin	1	-	-	√	2007
169	Kipas Angin	6	√	-	-	2019
170	Alat Dapur Lainnya	1	-	-	-	2010
171	Radio	1	√	-	-	2009
172	Televisi	1	-	-	√	2004
173	Televisi	7	√	-	-	2018
174	Loudspeker	2	-	-	√	2008
175	Sound System	1	-	-	√	2009
176	Sound System	1	√	-	-	2013
177	Sound System	1	√	-	-	2019
178	Wireless	1	-	-	√	2009
179	Megaphone	4	-	-	√	2006
180	Megaphone	2	-	-	√	2008
181	Microphone	1	-	-	√	2006
182	Microphone	2	√	-	-	2019
183	Stabilisator	1	-	-	√	2008
162	Dispenser	1	-	-	√	2006
163	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	-	-	-	2001
164	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	-	-	-	2008
165	Alat Rumah Tangga Lainnya	75	-	-	-	2014
166	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	√	-	-	2019
167	Alat Pemadam Portable	1	-	-	√	1996
168	Alat Pemadam Portable	4	-	-	√	2008
169	Alat Pemadam Portable	10	-	-	√	2015
170	Mainframe	1	√	-	-	2016
171	Internet	1	-	-	√	2009
172	PC Unit	3	-	-	√	2007
173	PC Unit	1	√	-	-	2008
174	PC Unit	3	-	-	√	2010
175	PC Unit	11	-	-	√	2011
176	PC Unit	3	√	-	-	2012
177	PC Unit	4	√	-	-	2013
178	PC Unit	2	√	-	-	2014
179	PC Unit	7	√	-	-	2015
180	PC Unit	7	-	-	√	2016
181	PC Unit	2	-	-	√	2017

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
182	PC Unit	10	√	-	-	2018
183	PC Unit	2	√	-	-	2019
184	PC Unit	4	√	-	-	2020
185	Laptop	2	-	-	√	2009
186	Laptop	1	√	-	-	2020
187	Notebook	1	√	-	-	2012
188	Notebook	2	-	-	√	2013
189	Notebook	2	√	-	-	2014
190	Notebook	5	-	-	√	2015
191	Notebook	3	-	-	√	2016
192	Notebook	2	√	-	-	2017
193	Notebook	5	√	-	-	2018
194	Notebook	2	√	-	-	2019
195	Hard Disk	2	-	-	√	2010
196	Hard Disk	3	√	-	-	2019
197	Printer	3	-	-	√	2008
198	Printer	5	-	-	√	2009
199	Printer	6	-	-	√	2010
200	Printer	15	-	-	√	2011
201	Printer	5	-	-	√	2012
202	Printer	7	-	-	√	2013
203	Printer	6	-	-	√	2014
204	Printer	7	√	-	-	2015
205	Printer	8	√	-	-	2016
206	Printer	2	√	-	-	2017
207	Printer	11	√	-	-	2018
208	Printer	12	√	-	-	2019
209	Printer	11	√	-	-	2020
210	Scanner	1	-	-	√	2007
211	Monitor	1	-	-	√	2007
212	Monitor	1	-	-	√	2009
213	Server	1	-	-	√	2007
214	Server	1	-	-	√	2009
215	Peralatan Jaringan Lainnya	1	√	-	-	2010
216	Meja Kerja Esselon II	1	√	-	-	2010
217	Meja Kerja Esselon III	4	√	-	-	2006
218	Meja Kerja Esselon III	1	-	-	-	2007
219	Meja Kerja Esselon III	2	√	-	-	2010
220	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	1	-	-	-	2000
221	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	2	-	-	-	2007
222	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	1	√	-	-	2008
223	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	4	√	-	-	2013
224	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	4	√	-	-	2014
225	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	4	√	-	-	2015
226	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	4	√	-	-	2016
227	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	2	√	-	-	2017
228	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	10	√	-	-	2018
229	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	4	√	-	-	2019
230	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	-	-	-	1996
231	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	-	-	-	2000
232	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	√	-	-	2006
233	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	√	-	-	2007
234	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	√	-	-	2008
235	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	√	-	-	2010

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
236	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	√	-	-	2013
237	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22	-	-	√	2014
238	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	-	-	√	2015
239	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	-	-	√	2016
240	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	-	-	√	2017
241	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	√	-	-	2018
242	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	24	√	-	-	2019
243	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-	-	2010
244	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	-	-	2005
245	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	√	-	-	2006
246	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	-	-	-	2007
247	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	√	-	-	2008
248	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	√	-	-	2010
249	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	-	-	-	2007
250	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	-	-	-	2008
251	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	2009
252	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	√	-	-	2012
253	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	√	-	-	2013
254	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	√	-	-	2014
255	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	√	-	-	2015
256	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	√	-	-	2016
257	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	√	-	-	2017
258	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	√	-	-	2018
259	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	√	-	-	2019
260	Kursi Kerja Non Struktural	6	√	-	-	2010
261	Kursi Kerja Non Struktural	20	√	-	-	2013
262	Kursi Kerja Non Struktural	22	√	-	-	2014
263	Kursi Kerja Non Struktural	20	√	-	-	2015
264	Kursi Kerja Non Struktural	20	√	-	-	2016
265	Kursi Kerja Non Struktural	10	√	-	-	2017
266	Kursi Kerja Non Struktural	15	√	-	-	2018
267	Kursi Kerja Non Struktural	24	√	-	-	2019
268	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	10	√	-	-	2017
269	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	10	√	-	-	2018
270	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	√	-	-	2008
271	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	5	√	-	-	2009
272	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	√	-	-	2013
273	Proyektor + Attachment	1	-	-	√	2007
274	Proyektor + Attachment	1	-	-	√	2008
275	Proyektor + Attachment	1	√	-	-	2013
276	Proyektor + Attachment	1	√	-	-	2019
277	Professional Sound System	1	-	-	√	2015
278	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	1	-	-	√	2008
279	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	11	-	-	√	2011
280	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	5	-	-	√	2012
281	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	8	-	-	√	2013
282	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	5	-	-	√	2014
283	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	7	-	-	√	2015
284	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	4	√	-	-	2016
285	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	2	-	-	√	2017
286	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	10	√	-	-	2018
287	Uninterruptible Power Supplies (UPS)	2	√	-	-	2019
288	Kamera Electronic	1	-	-	√	2008
289	Kamera Electronic	2	-	-	√	2009

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
290	Lensa Kamera	1	-	-	√	2013
291	Amplifier	1	-	-	√	2013
292	Telephone (PABX)	3	-	-	√	2000
293	Telephone (PABX)	2	-	-	√	2010
294	Pesawat Telephone	2	-	-	-	2000
295	Pesawat Telephone	2	-	-	√	2006
296	Pesawat Telephone	1	-	-	√	2010
297	Handy Talky	10	√	-	-	2007
298	Handy Talky	3	√	-	-	2009
299	Handy Talky	4	√	-	-	2011
300	Handy Talky	38	√	-	-	2012
301	Handy Talky	10	√	-	-	2014
302	Handy Talky	6	√	-	-	2019
303	Facsimile	2	-	-	√	2007
304	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	5	√	-	-	2008
305	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	13	√	-	-	2015
306	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	10	√	-	-	2016
307	Pistol	2	-	-	√	2003
308	Alat keamanan Lainnya	10	√	-	-	2013
309	Alat keamanan Lainnya	10	√	-	-	2014
310	Alat keamanan Lainnya	20	√	-	-	2015
311	Alat keamanan Lainnya	50	√	-	-	2016
312	Alat keamanan Lainnya	1	√	-	-	2017
313	Alat keamanan Lainnya	133	√	-	-	2018
314	Alat keamanan Lainnya	172	√	-	-	2019

2.3. SUMBER DAYA DINAS PEHUBUNGAN

Capaian kinerja Dinas Perhubungan diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Perhubungan dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan pada kurun waktu tahun 2016-2020, diketahui bahwa.

Rincian Mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel TC 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perhubungan 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2020					Realisasi Renstra Tahun 2016-2020					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Titik Kemacetan	Titik	18	16	14	12	10	14	14	14	12	10	78%	88%	100%	100%	100%
2	Jumlah Pengguna Jalur Sepeda	Jumlah	711	785	860	940	1020	773	783	976	940		109%	100%	113%	100%	0%
3	Jumlah Kecelakaan di darat	Jumlah	52	44	36	28	20	26	30	29	28	15	50%	68%	81%	100%	75%
4	Jumlah titik/lokasi parkir liar	Titik	16	14	12	10	10	32	14	12	10	12	200%	100%	100%	100%	120%
5	Jumlah Kedatangan Kapal	Jumlah	257767	267211	270655	277099	283543	21052	78047	10237	277099	9125	8%	29%	4%	100%	3%
6	Jumlah Keberangkatan Kapal	Jumlah	267185	273864	280544	287223	293903	11880	79682	15017	287223	8864	4%	29%	5%	100%	3%

7	Jumlah Kedatangan Penumpang Transportasi Sungai	Jumlah	323700	331792	339885	347977	356070	515750	582766	486418	347977	356782	159%	176%	143%	100%	100%
8	Jumlah Keberangkatan Penumpang Transportasi Sungai	Jumlah	346502	355164	363827	372489	381152	538488	592198	486418	372489	388187	155%	167%	134%	100%	102%
9	Jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan kota banjarmasin	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Persentase Faktor Muat	%	35	40	45	50	55	33	40	40	50		94%	100%	89%	100%	0%
11	Waktu antara kendaraan	Menit	45	40	35	30	25	45	35	30	30	25	100%	88%	86%	100%	100%
12	Rasio Penumpang Yang Memakai 2 Moda Transportasi (%)	%	1	1,5	2	2,5	3	5	6,5	2,6	2,5	2	500%	433%	130%	100%	67%
13	Jumlah Pelanggaran yang dilakukan awak kendaraan umum	Jumlah	35	33	28	22	15	48	59	34	22		137%	179%	121%	100%	0%
14	Persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan berdasarkan uji	%	55	60	65	70	75	40	60	66	70		73%	100%	102%	100%	0%
15	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses informasi dan komunikasi	%	97	98	99	100	100	97	0	0	0		100%	0%	0%	0%	0%
16	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%
17	Jumlah jenis data yang dapat	Jumlah	2	4	6	7	8	0	2	0	0		0%	50%	0%	0%	0%

Tabel 2.4 Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.005.418.000	907.537.352 90,26%		
a	Kegiatan Pemeliharaan Terminal	210.950.000	150.000.000 71,11% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah terpeliharanya Terminal Antasari sebagai Terminal yang aman dan nyaman. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,32 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 27,21 %.	Kendala pandemi dan keterlambatan dalam pembuatan hps dari konsultan dan kehati-hatian pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan karena harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	Mempersiapkan lebih dini kegiatan, baik kak, hps dan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan
b	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	794.468.000	757.537.352 95,35% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :	Sebagian anggaran dipotong untuk mengatasi covid-19	Kegiatan akan dioptimalkan pada tahun 2021

	Lalu Lintas Darat		<p>(a) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ.</p> <p>(b) Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>(c) Memperoleh informasi sebagai bahan untuk menciptakan Kota Banjarmasin menjadi Kota Tertib Lalu lintas</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,95%</p>		
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6.818.440.000	6.311.810.352 92,57%		
a	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
b	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	201.300.000	194.746.850 96,74%	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	-
			<p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Terpenuhinya Pendataan Volume lalu lintas angkutan sungai</p> <p>(b) Terpenuhinya analisa BOK dan tarif koridor 1 dan 2</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,14%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,67%.</p>		

c	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
d	Kegiatan Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	292.300.000	229.100.000 78,38% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengamanan H-7, H2, H+7, Lebaran Idul Fitri, Zero Accident, lancar dan terkendali. (b) Pengamanan H-3, H, H+3, Lebaran Idul Adha, zero accident, lancar dan terkendali. (c) Pengamanan H-3, H, H+3, Natal, zeroaccident, lancar dan terkendali. (d) Pengamanan H-3,H, H+3 Malam Tahun Baru, zero accident, lancar dan terkendali. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,81 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 20,43%.	Petugas lebih difokuskan pada penanganan covid-19	Membagi tugas kepada pegawai Non Aperatur untuk membantu bagian angkutan lebaran dan tahun baru.
e	Pendataan dan Penataan Jaringan Lalu Lintas	127.412000	125.785.000 98,72% Hasil yang dicapai pada akhir tahun 2020 sebesar 98,72% adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembaharuan data volume lalu lintas di kota Banjarmasin. (b) Analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas yang berdampak 	Anggaran yang terbatas untuk dapat mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dalam skala Kota	Perlu dianggarkan tiap tahun untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan lengkap.

			<p>kemacetan di kota Banjarmasin</p> <p>(c) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa.</p> <p>(d) Honorarium pejabat pemeriksa dan penerima barang.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,25 %, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,47 %.</p>		
f	Kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum	754.960.000	<p>605.070.000 80,15%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Meminimalisir angkutan kota dalam propinsi beroperasi dalam Kota Banjarmasin sehingga tidak terjadi rebutan penumpang dengan taksi kota (angkutan kota).</p> <p>(b) Menertibkan terminal liar / bayangan</p> <p>(c) Mengurangi kemacetan dalam kota Banjarmasin.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 24,84 %, pada tahun 2020 mengalami Kenaikan realisasi anggaran sebesar 55,31 %.</p>	Adanya Pandemi Covid - 19 menyebabkan angkutan sekolah hanya mengantar siswa mengumpulkan tugas sekolah sehingga serapan sewa angkutan kota untuk angkutan pelajar tidak terserap maksimal	Angkutan sekolah mengantar siswa mengumpulkan tugas sekolah
g	Kegiatan Forum LLAJ	31.630.000	<p>26.540.000 83,91%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah hasil dari pembahasan pada Rapat Forum LLAJ dilaksanakan langsung dilapangan.</p>	Agenda Forum LLAJ yang masih perlu dikembangkan. Keterlambatan dikarena menyesuaikan pandemi	Membuka kesempatan kepada seluruh anggota forum terkait permasalahan yang harus

			Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,94 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 14,03%.		dibahas pada Forum LLAJ
h	Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
i	Kegiatan Fasilitas Angkutan Massal Terintegrasi	5.410.838.000	5.130.568.502 94,82% Hasil yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 94.82 % ditahun 2019 kegiatan belum dianggarkan	Penambahan operasional Trans Banjarmasin tahap 2 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran di alihkan untuk penanganan Covid - 19	Penerapan protocol kesehatan diangkutan massal
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	935.970.000	922.647.035 98,58%		
a	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir	578.650.000	567.882.235 98,14% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Terlaksananya Pematangan lahan parkir kendaraan angkutan barang Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,84%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 0,7 %	Pematangan lahan parkir dilaksanakan sesuai anggaran	Sisa anggaran dikarenakan deviasi kontrak
b	Kegiatan Pembangunan Tempat tempat Pemberhentian Angkutan	357.320.000	354.764.800 99,28% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah : Terlaksananya Pembangunan tempat-tempat pemberhentian angkutan. Tahun 2019 Kegiatan ini belum dianggarkan	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Perlu penambahan halte di koridor trans Banjarmasin

4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4.723.339.000	4.633.018.700 98,09%		
a	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	268.111.000	261.640.900 97,59% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (a) Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan CCTV di persimpangan (b) Terlaksananya Pengadaan drone (4K Camera 12 MP 720p HD App-Based' Monitoring GPS Tracker) (c) Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Rubber Strip (Polisi Tidur Karet) Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,60%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 0,47 %	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Perlu adanya kegiatan ini dalam tiap tahunnya
b	Pengawasan dan Penertiban LLAJ dan Perparkiran (Operasional dan Pengendalian)	3.225.148.000	3.200.100.000 99,22% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : (a) Ploting anggota setiap pagi dari jam 07.00 s.d. 08.30 pada perempatan jalan dan siang hari dari jam 09.00 s.d.24.00,. (b) Patroli pengawasan dan penertiban LLAJ di wilayah Kota Banjarmasin.	Banyaknya titik kemacetan di Kota Banjarmasin	Melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dititik kemacetan dan patrioli pengawasan lalu lintas diwilayah Kota Banjarmasin

			<p>(c) Penertiban parkir di tepi jalan-jalan yang rawan kemacetan dan yang menggunakan bahu jalan.</p> <p>(d) Penataan pengawasan dan penertiban Terminal Antasari, Lingkar Selatan yang merupakan Terminal Bayangan.</p> <p>(e) Razia angkutan penumpang orang dan barang terutama di ruas jalan Pangeran Samudera dan Lambung Mangkurat serta Jl. Ujung murung.</p> <p>(f) Pengawasan dan pengaturan larangan truck masuk Kota Banjarmasin pada jam-jam tertentu untuk mengurangi kemacetan dalam kota.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,44%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,08%.</p>		
c	Penertiban, Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai (SAR)	105.600.000	<p>93.700.000 88,73%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Patroli pengawasan dan penertiban LLAS di beberapa sungai di wilayah Kota Banjarmasin.</p> <p>(b) Razia angkutan sungai berupa perijinan dan alat-alat keselamatan pelayaran.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,96%, pada tahun 2020 mengalami penurunan</p>	Melaksanakan dan memback up kegiatan pengamanan tim Covid-19	Melaksanakan patroli dan peneguran terhadap juri mudi kelotak Banjarmasin untuk penerapan protocol kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19.

			realisasi anggaran sebesar 10,23%.		
d	Operasional Pengawasan Parkir	871.250.000	<p>828.250.000 95,06%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Penertiban, pengawasan, penagihan retribusi parkir dan pajak parkir di kecamatan Banjarmasin Tengah, Timur, Barat, Utara dan Selatan.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 2,24%.</p>	Pengurangan gabungan APH dikarenakan covid, anggota dari APH banyak aktifitas melaksanakan kegiatan sendiri dalam rangka kegiatan internal mereka	Di lanjutkan tahun depan
e	Kajian Pengumpulan Data Lalu Lintas dan Fasilitas LLAJ	186.340.000	<p>182.437.800 97,91%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Pierre Tendean (Kawasan Wisata Siring).</p> <p>(b) Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kajian Pembaharuan Data Volume Lalu Lintas di Kota Banjarmasin.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,37%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,54%.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
f	Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas Siswa Sekolah	66.890.000	<p>66.890.000 100%</p> <p>Hasil yang dicapai pada tahun 2020 tercapai sebesar 100%, pada tahun 2019 anggaran ini belum dianggarkan</p>	Sebagian anggaran dipotong untuk mengatasi covid-19	

5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.026.034.000	1.009.898.300 98,43%		
a	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.026.034.000	1.009.898.300 98,43% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (a) Tersedianya alat keselamatan bagi para penguji kendaraan bermotor. (b) bermotor. (c) Terpenuhinya Alat Uji dan Kalibrasi. Terciptanya keamanan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor. (d) Tersedianya keperluan administrasi untuk pelayanan kntor (e) Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang akurat dan tepat. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 87,40%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 11,03%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
b	Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
6	Program Pembangunan Transportasi Darat	1.266.545.000	1.197.057.206 94,51%		
a	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan LLAJ	1.266.545.000	1.197.057.206 94,51% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : (a) Terlaksananya pemeliharaan sistem	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			<p>dan jaringan CCTV lalu lintas</p> <p>(b) Terpenuhinya Atribut Petugas Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas</p> <p>(c) Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Jalan</p> <p>(d) Terlaksananya Pemasangan Cermin Tikungan</p> <p>(e) Terpenuhinya pengadaan Sperator besi</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,58%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 3.07%.</p>		
7	Program Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLAS	1.675.562.000	1.656.200.764 98,84%		
a	Pembangunan Fasilitas Penunjang dermaga LLAS	245.700.000	<p>240.812.000 98,01%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah :</p> <p>(a) Terlaksananya Pembuatan Halaman Dermaga Banjar Raya</p> <p>(b) Terpenuhinya Pemasangan Paving Dermaga Banjar Raya</p> <p>(c) Terbangunnya Pos Retribusi di pintu masuk Kapal penumpang</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,74%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,27%.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Sungai	587.462.000	<p>586.965.764 99,92% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAS. (b) Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas sungai serta keamanan di dermaga Banjar Raya dan Dermaga Alalak (c) Terlaksananya Pemasangan Rambu-Rambu LLAS</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 99,51 %, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,41%.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
c	Pembersihan Alur Sungai dalam Wilayah Kota Banjarmasin	289.850.000	<p>289.130.000 99,75% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Pembersihan alur sungai yang bebas dari hambatan pelayaran sehingga masyarakat Kota Banjarmasin dapat aman mempergunakan sungai sebagai alat transportasi dan perekonomian.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 92,96%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 6,79%.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Untuk tahun 2021 kegiatan dialihkan ke Dinas PUPR
d	Pembangunan Dermaga	552.550.000	<p>539.293.000 97,60% Hasil yang dicapai pada akhir tahun 2020 adalah Terpenuhinya pembangunan dermaga</p>	Kegiatan dilaksanakan sesuai Penentuan titik dan lokasi	Perlu dilakukan kepastian lahan dan lokasi kepada masyarakat

			Pada tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.		pada saat perencanaan
NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.005.418.000	907.537.352 90,26%		
a	Kegiatan Pemeliharaan Terminal	210.950.000	<p>150.000.000 71,11%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah terpeliharanya Terminal Antasari sebagai Terminal yang aman dan nyaman.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,32 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 27,21 %.</p>	Kendala pandemi dan keterlambatan dalam pembuatan hps dari konsultan dan kehati-hatian pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan karena harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	Mempersiapkan lebih dini kegiatan, baik kak, hps dan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan
b	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Darat	794.468.000	<p>757.537.352 95,35%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (d) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ. (e) Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (f) Memperoleh informasi sebagai bahan untuk menciptakan Kota Banjarmasin menjadi Kota Tertib Lalu lintas <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,95%</p>	Sebagian anggaran dipotong untuk mengatasi covid-19	Kegiatan akan dioptimalkan pada tahun 2021

2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6.818.440.000	6.311.810.352 92,57%		
a	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
b	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	201.300.000	194.746.850 96,74% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (c) Terpenuhinya Pendataan Volume lalu lintas angkutan sungai (d) Terpenuhinya analisa BOK dan tarif koridor 1 dan 2 Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,14%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,67%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	-
c	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
d	Kegiatan Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	292.300.000	229.100.000 78,38% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (e) Pengamanan H-7, H2, H+7, Lebaran Idul Fitri, Zero Accident, lancar dan terkendali. (f) Pengamanan H-3, H, H+3, Lebaran	Petugas lebih difokuskan pada penanganan covid-19	Membagi tugas kepada pegawai Non Aperatur untuk membantu bagian angkutan lebaran dan tahun baru.

			<p>Idul Adha, zero accident, lancar dan terkendali.</p> <p>(g) Pengamanan H-3, H, H+3, Natal, zeroaccident, lancar dan terkendali.</p> <p>(h) Pengamanan H-3,H, H+3 Malam Tahun Baru, zero accident, lancar dan terkendali.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,81 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 20,43%.</p>		
e	Pendataan dan Penataan Jaringan Lalu Lintas	127.412000	<p>125.785.000 98,72%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun 2020 sebesar 98,72% adalah sebagai berikut :</p> <p>(e) Pembaharuan data volume lalu lintas di kota Banjarmasin.</p> <p>(f) Analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas yang berdampak kemacetan di kota Banjarmasin</p> <p>(g) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa.</p> <p>(h) Honorarium pejabat pemeriksa dan penerima barang.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,25 %, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,47 %.</p>	Anggaran yang terbatas untuk dapat mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dalam skala Kota	Perlu dianggarkan tiap tahun untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan lengkap.
f	Kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian	754.960.000	<p>605.070.000 80,15%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran</p>	Adanya Pandemi Covid - 19 menyebabkan angkutan sekolah hanya mengantar	Angkutan sekolah mengantar siswa mengumpulkan

	Angkutan Umum		<p>2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(d) Meminimalisir angkutan kota dalam propinsi beroperasi dalam Kota Banjarmasin sehingga tidak terjadi rebutan penumpang dengan taksi kota (angkutan kota).</p> <p>(e) Menertibkan terminal liar / bayangan</p> <p>(f) Mengurangi kemacetan dalam kota Banjarmasin.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 24,84 %, pada tahun 2020 mengalami Kenaikan realisasi anggaran sebesar 55,31 %.</p>	siswa mengumpulkan tugas sekolah sehingga serapan sewa angkutan kota untuk angkutan pelajar tidak terserap maksimal	n tugas sekolah
g	Kegiatan Forum LLAJ	31.630.000	<p>26.540.000 83,91%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah hasil dari pembahasan pada Rapat Forum LLAJ dilaksanakan langsung dilapangan.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,94 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 14,03%.</p>	Agenda Forum LLAJ yang masih perlu dikembangkan. Keterlambatan dikarena menyesuaikan pandemi	Membuka kesempatan kepada seluruh anggota forum terkait permasalahan yang harus dibahas pada Forum LLAJ
h	Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
i	Kegiatan Fasilitasi Angkutan Massal Terintegrasi	5.410.838.000	<p>5.130.568.502 94,82%</p> <p>Hasil yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 94.82 % ditahun 2019 kegiatan belum dianggarkan</p>	Penambahan operasional Trans Banjarmasin tahap 2 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran di alihkan untuk penanganan Covid - 19	Penerapan protocol kesehatan diangkutan massal

3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	935.970.000	922.647.035 98,58%		
a	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir	578.650.000	567.882.235 98,14% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Terlaksananya Pematangan lahan parkir kendaraan angkutan barang Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,84%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 0,7 %	Pematangan lahan parkir dilaksanakan sesuai anggaran	Sisa anggaran dikarenakan deviasi kontrak
b	Kegiatan Pembangunan Tempat tempat Pemberhentian Angkutan	357.320.000	354.764.800 99,28% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah : Terlaksananya Pembangunan tempat-tempat pemberhentian angkutan. Tahun 2019 Kegiatan ini belum dianggarkan	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Perlu penambahan halte di koridor trans Banjarmasin
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4.723.339.000	4.633.018.700 98,09%		
a	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	268.111.000	261.640.900 97,59% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (d) Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan CCTV di persimpangan (e) Terlaksananya Pengadaan drone (4K Camera 12 MP 720p	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Perlu adanya kegiatan ini dalam tiap tahunnya

			<p>HD App-Based' Monitoring GPS Tracker)</p> <p>(f) Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Rubber Strip (Polisi Tidur Karet)</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,60%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 0,47 %</p>		
b	Pengawasan dan Penertiban LLAJ dan Perparkiran (Operasional dan Pengendalian)	3.225.148.000	<p>3.200.100.000 99,22%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>(g) Ploting anggota setiap pagi dari jam 07.00 s.d. 08.30 pada perempatan jalan dan siang hari dari jam 09.00 s.d.24.00,.</p> <p>(h) Patroli pengawasan dan penertiban LLAJ di wilayah Kota Banjarmasin.</p> <p>(i) Penertiban perparkiran di tepi jalan-jalan yang rawan kemacetan dan yang menggunakan bahu jalan.</p> <p>(j) Penataan pengawasan dan penertiban Terminal Antasari, Lingkar Selatan yang merupakan Terminal Bayangan.</p> <p>(k) Razia angkutan penumpang orang dan barang terutama di ruas jalan Pangeran Samudera dan Lambung Mangkurat serta Jl. Ujung murung.</p> <p>(l) Pengawasan dan pengaturan larangan</p>	Banyaknya titik kemacetan di Kota Banjarmasin	Melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dititik kemacetan dan patrioli pengawasan lalu lintas diwilayah Kota Banjarmasin

			<p>truck masuk Kota Banjarmasin pada jam-jam tertentu untuk mengurangi kemacetan dalam kota.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,44%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,08%.</p>		
c	Penertiban, Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai (SAR)	105.600.000	<p>93.700.000 88,73%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(c) Patroli pengawasan dan penertiban LLAS di beberapa sungai di wilayah Kota Banjarmasin.</p> <p>(d) Razia angkutan sungai berupa perijinan dan alat-alat keselamatan pelayaran.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,96%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 10,23%.</p>	Melaksanakan dan memback up kegiatan pengamanan tim Covid-19	Melaksanakan patroli dan peneguran terhadap juri mudi kelotak Banjarmasin untuk penerapan protocol kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19.
d	Operasional Pengawasan Parkir	871.250.000	<p>828.250.000 95,06%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Penertiban, pengawasan, penagihan retribusi parkir dan pajak parkir di kecamatan Banjarmasin Tengah, Timur, Barat, Utara dan Selatan.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 2,24%.</p>	Pengurangan gabungan APH dikarenakan covid, anggota dari APH banyak aktifitas melaksanakan kegiatan sendiri dalam rangka kegiatan internal mereka	Di lanjutkan tahun depan

e	Kajian Pengumpulan Data Lalu Lintas dan Fasilitas LLAJ	186.340.000	182.437.800 97,91% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (c) Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Pierre Tendean (Kawasan Wisata Siring). (d) Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kajian Pembaharuan Data Volume Lalu Lintas di Kota Banjarmasin. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,37%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,54%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
f	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah	66.890.000	66.890.000 100% Hasil yang dicapai pada tahun 2020 tercapai sebesar 100%, pada tahun 2019 anggaran ini belum dianggarkan	Sebagian anggaran dipotong untuk mengatasi covid-19	
5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.026.034.000	1.009.898.300 98,43%		
a	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.026.034.000	1.009.898.300 98,43% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (f) Tersedianya alat keselamatan bagi para penguji kendaraan bermotor. (g) bermotor. (h) Terpenuhinya Alat Uji dan Kalibrasi.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			<p>Terciptanya keamanan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.</p> <p>(i) Tersedianya keperluan administrasi untuk pelayanan kantor</p> <p>(j) Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang akurat dan tepat.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 87,40%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 11,03%.</p>		
b	Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
6	Program Pembangunan Transportasi Darat	1.266.545.000	1.197.057.206 94,51%		
a	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan LLAJ	1.266.545.000	<p>1.197.057.206 94,51%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>(f) Terlaksananya pemeliharaan sistem dan jaringan CCTV lalu lintas</p> <p>(g) Terpenuhinya Atribut Petugas Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas</p> <p>(h) Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Jalan</p> <p>(i) Terlaksananya Pemasangan Cermin Tikungan</p> <p>(j) Terpenuhinya pengadaan Sperator besi</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,58%, pada tahun 2020 mengalami penurunan</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			realisasi anggaran sebesar 3.07%.		
7	Program Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLAS	1.675.562.000	1.656.200.764 98,84%		
a	Pembangunan Fasilitas Penunjang Dermaga LLAS	245.700.000	240.812.000 98,01% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah : (d) Terlaksananya Pembuatan Halaman Dermaga Banjar Raya (e) Terpenuhinya Pemasangan Paving Dermaga Banjar Raya (f) Terbangunnya Pos Retribusi di pintu masuk Kapal penumpang Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,74%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,27%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Sungai	587.462.000	586.965.764 99,92% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (d) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAS. (e) Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas sungai serta keamanan di dermaga Banjar Raya dan Dermaga Alalak (f) Terlaksananya Pemasangan	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			Rambu-Rambu LLAS Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 99,51 %, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,41%.		
c	Pembersihan Alur Sungai dalam Wilayah Kota Banjarmasin	289.850.000	289.130.000 99,75% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Pembersihan alur sungai yang bebas dari hambatan pelayaran sehingga masyarakat Kota Banjarmasin dapat aman mempergunakan sungai sebagai alat transportasi dan perekonomian. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 92,96%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 6,79%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Untuk tahun 2021 kegiatan dialihkan ke Dinas PUPR
d	Pembangunan Dermaga	552.550.000	539.293.000 97,60% Hasil yang dicapai pada akhir tahun 2020 adalah Terpenuhinya pembangunan dermaga Pada tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.	Kegiatan dilaksanakan sesuai Penentuan titik dan lokasi	Perlu dilakukan kepastian lahan dan lokasi kepada masyarakat pada saat perencanaan
NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.005.418.000	907.537.352 90,26%		
a	Kegiatan Pemeliharaan Terminal	210.950.000	150.000.000 71,11% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah terpeliharanya Terminal	Kendala pandemi dan keterlambatan dalam pembuatan hps dari konsultan dan kehati-hatian pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan	Mempersiapkan lebih dini kegiatan, baik kak, hps dan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu

			<p>Antasari sebagai Terminal yang aman dan nyaman.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,32 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 27,21 %.</p>	karena harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	yang ditetapkan
b	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Darat	794.468.000	<p>757.537.352 95,35%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (g) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ. (h) Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (i) Memperoleh informasi sebagai bahan untuk menciptakan Kota Banjarmasin menjadi Kota Tertib Lalu lintas <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,95%</p>	Sebagian anggaran dipotong untuk mengatasi covid-19	Kegiatan akan dioptimalkan pada tahun 2021
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6.818.440.000	6.311.810.352 92,57%		
a	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
b	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	201.300.000	<p>194.746.850 96,74%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p>	Tidak ada permasalahan	-
				Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			<p>(e) Terpenuhinya Pendataan Volume lalu lintas angkutan sungai</p> <p>(f) Terpenuhinya alanisa BOK dan tarif koridor 1 dan 2</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,14%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 1,67%.</p>		
c	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
d	Kegiatan Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	292.300.000	<p>229.100.000 78,38%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengamanan H-7, H2, H+7, Lebaran Idul Fitri, Zero Accident, lancar dan terkendali. (j) Pengamanan H-3, H, H+3, Lebaran Idul Adha, zero accident, lancar dan terkendali. (k) Pengamanan H-3, H, H+3, Natal, zeroaccident, lancar dan terkendali. (l) Pengamanan H-3,H, H+3 Malam Tahun Baru, zero accident, lancar dan terkendali. <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,81 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 20,43%.</p>	Petugas lebih difokuskan pada penanganan covid-19	Membagi tugas kepada pegawai Non Aperatur untuk membantu bagian angkutan lebaran dan tahun baru.

e	Pendataan dan Penataan Jaringan Lalu Lintas	127.412000	<p>125.785.000 98,72% Hasil yang dicapai pada akhir tahun 2020 sebesar 98,72% adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pembaharuan data volume lalu lintas di kota Banjarmasin. (j) Analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas yang berdampak kemacetan di kota Banjarmasin (k) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa. (l) Honorarium pejabat pemeriksa dan penerima barang. <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,25 %, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,47 %.</p>	Anggaran yang terbatas untuk dapat mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dalam skala Kota	Perlu dianggarkan tiap tahun untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan lengkap.
f	Kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum	754.960.000	<p>605.070.000 80,15% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (g) Meminimalisir angkutan kota dalam propinsi beroperasi dalam Kota Banjarmasin sehingga tidak terjadi rebutan penumpang dengan taksi kota (angkutan kota). (h) Menertibkan terminal liar / bayangan (i) Mengurangi kemacetan dalam kota Banjarmasin. 	Adanya Pandemi Covid - 19 menyebabkan angkutan sekolah hanya mengantar siswa mengumpulkan tugas sekolah sehingga serapan sewa angkutan kota untuk angkutan pelajar tidak terserap maksimal	Angkutan sekolah mengantar siswa mengumpulkan tugas sekolah

			Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 24,84 %, pada tahun 2020 mengalami Kenaikan realisasi anggaran sebesar 55,31 %.		
g	Kegiatan Forum LLAJ	31.630.000	26.540.000 83,91% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah hasil dari pembahasan pada Rapat Forum LLAJ dilaksanakan langsung dilapangan. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,94 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 14,03%.	Agenda Forum LLAJ yang masih perlu dikembangkan. Keterlambatan dikarena menyesuaikan pandemi	Membuka kesempatan kepada seluruh anggota forum terkait permasalahan yang harus dibahas pada Forum LLAJ
h	Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
i	Kegiatan Fasilitas Angkutan Massal Terintegrasi	5.410.838.000	5.130.568.502 94,82% Hasil yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 94.82 % ditahun 2019 kegiatan belum dianggarkan	Penambahan operasional Trans Banjarmasin tahap 2 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran di alihkan untuk penanganan Covid - 19	Penerapan protocol kesehatan diangkutan massal
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	935.970.000	922.647.035 98,58%		
a	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir	578.650.000	567.882.235 98,14% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Terlaksananya Pematangan lahan parkir kendaraan angkutan barang Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,84%, pada tahun 2020 mengalami penurunan	Pematangan lahan parkir dilaksanakan sesuai anggaran	Sisa anggaran dikarenakan deviasi kontrak

			realisasi anggaran sebesar 0,7 %		
b	Kegiatan Pembangunan Tempat tempat Pemberhentian Angkutan	357.320.000	354.764.800 99,28% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah : Terlaksananya Pembangunan tempat-tempat pemberhentian angkutan. Tahun 2019 Kegiatan ini belum dianggarkan	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Perlu penambahan halte di koridor trans Banjarmasin
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4.723.339.000	4.633.018.700 98,09%		
a	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	268.111.000	261.640.900 97,59% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (g) Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan CCTV di persimpangan (h) Terlaksananya Pengadaan drone (4K Camera 12 MP 720p HD App-Based' Monitoring GPS Tracker) (i) Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Rubber Strip (Polisi Tidur Karet) Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,60%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 0,47 %	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Perlu adanya kegiatan ini dalam tiap tahunnya
b	Pengawasan dan Penertiban LLAJ dan	3.225.148.000	3.200.100.000 99,22%	Banyaknya titik kemacetan di Kota Banjarmasin	Melaksanakan kegiatan pengaturan

	Perparkiran (Operasional dan Pengendalian)		<p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>(m) Ploting anggota setiap pagi dari jam 07.00 s.d. 08.30 pada perempatan jalan dan siang hari dari jam 09.00 s.d.24.00,.</p> <p>(n) Patroli pengawasan dan penertiban LLAJ di wilayah Kota Banjarmasin.</p> <p>(o) Penertiban perparkiran di tepi jalan-jalan yang rawan kemacetan dan yang menggunakan bahu jalan.</p> <p>(p) Penataan pengawasan dan penertiban Terminal Antasari, Lingkar Selatan yang merupakan Terminal Bayangan.</p> <p>(q) Razia angkutan penumpang orang dan barang terutama di ruas jalan Pangeran Samudera dan Lambung Mangkurat serta Jl. Ujung murung.</p> <p>(r) Pengawasan dan pengaturan larangan truck masuk Kota Banjarmasin pada jam-jam tertentu untuk mengurangi kemacetan dalam kota.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,44%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,08%.</p>		lalu lintas dititik kemacetan dan patrioli pengawasan lalu lintas diwilayah Kota Banjarmasin
c	Penertiban, Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai (SAR)	105.600.000	<p>93.700.000 88,73%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p>	Melaksanakan dan memback up kegiatan pengamanan tim Covid-19	Melaksanakan patroli dan peneguran terhadap juri mudi kelotak Banjarmasin untuk penerapan

			<p>(e) Patroli pengawasan dan penertiban LLAS di beberapa sungai di wilayah Kota Banjarmasin.</p> <p>(f) Razia angkutan sungai berupa perijinan dan alat-alat keselamatan pelayaran.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 98,96%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 10,23%.</p>		protocol kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19.
d	Operasional Pengawasan Parkir	871.250.000	<p>828.250.000 95,06%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Penertiban, pengawasan, penagihan retribusi parkir dan pajak parkir di kecamatan Banjarmasin Tengah, Timur, Barat, Utara dan Selatan.</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 2,24%.</p>	Pengurangan gabungan APH dikarenakan covid, anggota dari APH banyak aktifitas melaksanakan kegiatan sendiri dalam rangka kegiatan internal mereka	Di lanjutkan tahun depan
e	Kajian Pengumpulan Data Lalu Lintas dan Fasilitas LLAJ	186.340.000	<p>182.437.800 97,91%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(e) Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Pierre Tendean (Kawasan Wisata Siring).</p> <p>(f) Terpenuhinya Pembuatan Dokumen Kajian Pembaharuan Data Volume Lalu Lintas di Kota Banjarmasin.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,37%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,54%.		
f	Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas Siswa Sekolah	66.890.000	66.890.000 100% Hasil yang dicapai pada tahun 2020 tercapai sebesar 100%, pada tahun 2019 anggaran ini belum dianggarkan	Sebagian anggaran dipotong untuk mengatasi covid-19	
5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.026.034.000	1.009.898.300 98,43%		
a	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.026.034.000	1.009.898.300 98,43% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut : (k) Tersedianya alat keselamatan bagi para penguji kendaraan bermotor. (l) bermotor. (m) Terpenuhinya Alat Uji dan Kalibrasi. Terciptanya keamanan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor. (n) Tersedianya keperluan administrasi untuk pelayanan kantor (o) Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang akurat dan tepat. Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 87,40%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 11,03%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

b	Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	Anggaran dialihkan untuk mengatasi Covid-19	
6	Program Pembangunan Transportasi Darat	1.266.545.000	1.197.057.206 94,51%		
a	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan LLAJ	1.266.545.000	1.197.057.206 94,51% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : (k) Terlaksananya pemeliharaan sistem dan jaringan CCTV lalu lintas (l) Terpenuhinya Atribut Petugas Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (m) Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Jalan (n) Terlaksananya Pemasangan Cermin Tikungan (o) Terpenuhinya pengadaan Sperator besi Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,58%, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 3.07%.	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
7	Program Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLAS	1.675.562.000	1.656.200.764 98,84%		
a	Pembangunan Fasilitas Penunjang dermaga LLAS	245.700.000	240.812.000 98,01% Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 adalah : (g) Terlaksananya Pembuatan Halaman Dermaga Banjar Raya	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	

			<p>(h) Terpenuhinya Pemasangan Paving Dermaga Banjar Raya</p> <p>(i) Terbangunnya Pos Retribusi di pintu masuk Kapal penumpang</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 97,74%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,27%.</p>		
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Sungai	587.462.000	<p>586.965.764 99,92%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>(g) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAS.</p> <p>(h) Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas sungai serta keamanan di dermaga Banjar Raya dan Dermaga Alalak</p> <p>(i) Terlaksananya Pemasangan Rambu-Rambu LLAS</p> <p>Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 99,51 %, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,41%.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	
c	Pembersihan Alur Sungai dalam Wilayah Kota Banjarmasin	289.850.000	<p>289.130.000 99,75%</p> <p>Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2020 adalah Pembersihan alur sungai yang bebas dari hambatan pelayaran sehingga masyarakat Kota Banjarmasin dapat aman mempergunakan sungai sebagai alat transportasi dan perekonomian.</p>	Tidak ada permasalahan Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan	Untuk tahun 2021 kegiatan dialihkan ke Dinas PUPR

			Dibandingkan dengan tahun 2019 tercapai 92,96%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 6,79%.		
d	Pembangunan Dermaga	552.550.000	539.293.000 97,60% Hasil yang dicapai pada akhir tahun 2020 adalah Terpenuhinya pembangunan dermaga Pada tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.	Kegiatan dilaksanakan sesuai Penentuan titik dan lokasi	Perlu dilakukan kepastian lahan dan lokasi kepada masyarakat pada saat perencanaan

Rincian mengenai pencapaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.4

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Belanja	10.241.038.000	7.094.928.000	17.093.332.474	28.145.272.373	19.284.692.441	9.440.759.650	6.459.675.790	13.065.605.308	17.995.443.156	18.108.871.645	92%	91%	76%	64%	94%	2.260.913.610	83,4%
Belanja Tidak Langsung	0	0	8.787.358.474	14.018.721.373	8.594.693.441	0	0	5.334.979.253	7.759.279.456	7.917.559.138			61%	55%	92%	-96.332.517	73.5%
Belanja Pegawai			8.787.358.474	14.018.721.373	8.594.693.441			5.334.979.253	7.759.279.456	7.917.559.138			61%	55%	92%	-96.332.517	73.5%
Belanja Langsung	10.241.038.000	7.094.928.000	8.305.974.000	14.126.551.000	10.689.999.000	9.440.759.650	6.459.675.790	7.730.626.055	10.236.163.700	10.191.312.507	92%	91%	93%	72%	95%	112.240.250	89%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.769.813.000	3.180.320.000	3.975.250.000	4.524.161.000	4.282.738.000	1.609.698.000	3.019.884.100	3.816.620.000	4.443.325.000	4.210.787.800	91%	95%	96%	98%	98%	628.231.250	96%
Pengawasan dan Penertiban LLAJ dan Perparkiran (Operasional dan Pengendalian)	1.497.888.000	2.785.080.000	3.468.480.000	3.598.415.000	3.225.148.000	1.462.768.000	2.675.320.000	3.428.250.000	3.542.335.000	3.200.100.000	98%	96%	99%	98%	99%	431.815.000	98%
Penertiban Parkir Terpadu Pertriwulan melibatkan Poltabes dan Pol-PP	60.180.000	60.360.000				45.135.000	13.270.000				75%	22%				180.000	49%
Kajian pengumpulan data lalu lintas dan fasilitas LLAJ		105.560.000	129.110.000	349.490.000	186.340.000		103.879.100	125.510.000	340.314.000	182.437.800		98%	97%	97%	98%	26.926.667	98%
Operasional Pengawasan Parkir	106.740.000	229.320.000	377.660.000	576.256.000	871.250.000	101.795.000	227.415.000	262.860.000	560.676.000	828.250.000	95%	99%	70%	97%	95%	191.127.500	91%
Kajian pengumpulan data lalu lintas dan fasilitas LLAJ		105.560.000	129.110.000	349.490.000	186.340.000		103.879.100	125.510.000	340.314.000	182.437.800		98%	97%	97%	98%	26.926.667	98%
Pengadaan rambu rambu lalu lintas		277.610.000	546.130.000	325.361.000	268.111.000		272.129.000	535.754.500	320.822.000	261.640.900		98%	98%	99%	98%	-3.166.333	98%
Penertiban, Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai (SAR)	105.005.000	67.755.000	153.360.000	105.600.000	105.600.000	84.090.000	67.335.000	148.860.000	104.500.000	93.700.000	80%	99%	97%	99%	89%	148.750	93%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.525.170.000	1.659.695.000	1.797.360.000	1.797.182.000	1.592.880.000	4.358.205.650	1.608.501.000	1.699.512.855	1.763.260.000	1.494.503.116	96%	97%	95%	98%	94%	-733.072.500	96%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Darat	1.915.000.000	1.036.885.000	1.130.000.000	1.089.648.000	794.468.000	1.827.710.650	1.022.259.000	1.062.689.855	1.060.267.000	757.537.352	95%	99%	94%	97%	95%	-280.133.000	96%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan	663.530.000	521.450.000	431.550.000	581.384.000	587.462.000	607.798.000	507.602.000	427.645.000	578.965.000	586.965.764	92%	97%	99%	100%	100%	-19.017.000	98%

dan Perlengkapan Lalu Lintas Sungai																	
Pemeliharaan terminal	1.946.640.000	101.360.000	235.810.000	126.150.000	210.950.000	1.922.697.000	78.640.000	209.178.000	124.028.000	150.000.000	99%	78%	89%	98%	71%		
Program Pembangunan Transportasi Darat	754.245.000			878.948.000	1.266.545.000	732.014.000			857.660.000	1.197.057.206	97%			98%	95%		
Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ	544.275.000			878.948.000	1.266.545.000	526.114.000			857.660.000	1.197.057.206	97%			98%	95%		
Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ (DAK)	209.970.000					205.900.000					98%						
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.922.980.000	1.373.003.000	1.403.418.000	5.051.196.000	1.697.452.000	1.507.155.000	977.407.090	1.178.260.500	1.623.901.000	1.470.371.850	78%	71%	84%	32%	87%		
Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan	431.690.000	416.860.000	103.530.000	201.300.000	201.300.000	409.494.000	160.210.000	101.930.000	197.562.000	194.746.850	95%	38%	98%	98%	97%		
Pembersihan Alur Sungai dalam Wilayah Kota Banjarmasin	110.110.000	109.810.000	153.200.000	269.910.000	289.850.000	108.990.000	107.610.000	146.570.000		289.130.000	99%	98%	96%	0%	100%		
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang		33.360.000	33.830.000	29.650.000	0		18.629.545	27.871.000	25.006.000	0		56%	82%	84%			
Operasi pengawasan & pengendalian angkutan Kota dalam provinsi (AKDP) yang masuk Kota Banjarmasin	315.600.000					314.800.000					100%						
Operasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan umum	315.600.000	178.860.000	397.860.000	4.131.636.000	754.960.000	301.328.000	134.660.000	250.405.000	1.026.487.000	605.070.000	95%	75%	63%	25%	80%		
Operasi angkutan lebaran, natal dan Tahun baru	334.125.000	298.203.000	291.153.000	236.930.000	292.300.000	301.328.000	252.830.000	267.060.000	234.110.000	229.100.000	90%	85%	92%	99%	78%		
Forum LLAJ		62.260.000	111.335.000	31.630.000	31.630.000		58.573.000	108.840.000	30.980.000	26.540.000		94%	98%	98%	84%		
Pendataan dan Penataan Jaringan Lalu Lintas	334.125.000										0%						
Pendataan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum		132.460.000	178.410.000	46.630.000	127.412.000		130.625.000	159.980.000	45.348.000	125.785.000		99%	90%	97%	99%		

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	81.730.000	141.190.000	134.100.000	103.510.000	0	71.215.000	114.269.545	115.604.500	64.408.000	0	87%	81%	86%	62%			
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	381.850.000	161.760.000	208.910.000	343.574.000	824.350.000	365.941.000	158.106.500	200.262.000	209.500.000	808.694.235	96%	98%	96%	61%	98%		
Pembangunan Fasilitas Penunjang Dermaga LLAS	381.850.000	161.760.000	208.910.000		245.700.000	365.941.000	158.106.500	200.262.000		240.812.000	96%	98%	96%				
Monitoring, evaluasi dan pelaporan																	
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat				131.624.000										0%			
Pembangunan sarana dan prasarana parkir				211.950.000	578.650.000				209.500.000	567.882.235				99%	98%		
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor	886.980.000	720.150.000	921.036.000	1.531.490.000	1.026.034.000	867.746.000	695.777.100	835.970.700	1.338.517.700	1.009.898.300	98%	97%	91%	87%	98%		
Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	886.980.000	720.150.000	921.036.000	1.531.490.000	1.026.034.000	867.746.000	695.777.100	835.970.700	1.338.517.700	1.009.898.300	98%	97%	91%	87%	98%		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026 adalah bagaimana langkah strategis memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan tugas Walikota dan Wakil Walikota dimana selama 5 (lima) tahun ke depan akan banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah peningkatan standar pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan terkait dengan pelayanan.

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasiomal jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, penataan, pengendalian manajemen lalu lintas jalan dan sungai;
2. Perumusan kebijakan teknis perbengkelan, terminal, perparkiran dan akreditasi uji kendaraan bermotor;
3. Penyelenggara, pengelola, memelihara serta pelaksana pengembangan dan peningkatan fungsi/manfaat sarana dan prasarana lalu lintas di jalan maupun di sungai;
4. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan dan di sungai;
5. Penyiapan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
6. Penyiapan, pelaksanaan, pelayanan kebutuhan dan kelayakan operasional angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis perizinan dan pengembangan di bidang perhubungan;
8. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

sehingga peningkatan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana mutlak harus dilakukan. Seiring dengan meningkatnya beban kerja, bertambahnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor, serta penerapan teknologi informasi, maka hal tersebut menuntut adanya pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan yang telah ada sehingga menciptakan kenyamanan kerja.

Selain tantangan yang ada, dalam rangka pengembangan pelayanan, peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Dinas Perhubungan karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan

transparan. Peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Kota Banjarmasin pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya sejak mulai dari sekarang. Selain itu, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor ke depan, maka layanan Dinas Perhubungan dalam mendukung program Walikota dan Wakil Walikota ke depan akan lebih maksimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, penataan, pengendalian manajemen lalu lintas jalan dan sungai;
2. Perumusan kebijakan teknis perbengkelan, terminal, perparkiran dan akreditasi uji kendaraan bermotor;
3. Penyelenggara, pengelola, memelihara serta pelaksana pengembangan dan peningkatan fungsi/manfaat sarana dan prasarana lalu lintas di jalan maupun di sungai;
4. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan dan di sungai;
5. Penyiapan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
6. Penyiapan, pelaksanaan, pelayanan kebutuhan dan kelayakan operasional angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis perizinan dan pengembangan di bidang perhubungan; Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

Dan tugas Dinas Perhubungan adalah Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasiomal jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasiomal jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan , Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Perhubungan

Aspek	Deskripsi
Aspek Sumber Daya Manusia	Apabila dilihat dari kualitas SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas Dinas Perhubungan yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dilihat dari jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak, namun pada beberapa

	<p>kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan Dinas Perhubungan menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus. Rendahnya kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh etos dan budaya kerja yang lamban, tidak ramah dan tidak transparan. Sementara itu, terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dalam hal rekrutmen dan pengembangan ASN menjadi hambatan tersendiri dalam menghadapi keterbatasan ini. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi baik dalam internal Perangkat Daerah sehingga berpengaruh dalam pencapaian kinerja.</p>
Aspek Teknis	<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan, Dinas Perhubungan telah Menyusun Renstra 2021-2026 sebagai pedoman dalam mewujudkan peningkatan kualitas kegiatan tersebut.</p> <p>Dalam Renstra telah disebutkan ada 7 (tujuh) Titik yang menjadi Lokasi Integrasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantuil 2. Banjar Raya 3. Pasar Baru 4. Titik 0 Km 5. Alalak 6. Sungai Lulut 7. Pelabuhan Trisakti. <p>7 (Tujuh) Titik tersebut tentunya memiliki kondisi penataan ruang dan lingkungan yang berbeda-beda. Dalam Renstra juga disiapkan Rencana Induk Transportasi yang akan dimulai dari tahun 2021 dengan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai. Kemudian di tahun 2022 ada dua kegiatan yaitu Penyusunan Revisi Tatralok dan Pembuatan Masterplan Sistem Transportasi di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2023 akan dilanjutkan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ.</p> <p>Apabila diurutkan berdasarkan tahun kegiatan, maka pada tahun 2021 fokus peningkatan akan berada pada Lokasi Integrasi di Mantuil dan Banjar Raya. Pada tahun 2022 fokus peningkatan akan berada pada lokasi Banjar Raya, Pasar Baru, Titik 0 Km, Alalak, dan Pelabuhan Trisakti.</p>

	<p>Pada tahun 2023 lokasi integrasi berfokus di Pasar Baru, Titik 0 Km, Alalak, Sungai Lulut dan Pelabuhan Trisakti.</p> <p>Pada tahun 2024 lokasi integrasi akan dikerjakan di Titik 0 Km, Alalak, Sungai Lulut dan Pelabuhan Trisakti.</p> <p>Pada tahun 2025 lokasi integrasi akan dikerjakan di Sungai Lulut dan Pelabuhan Trisakti.</p> <p>Pada tahun 2026 lokasi integrasi akan dikerjakan di Pelabuhan Trisakti.</p> <p>Adapun dalam meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan, Dinas Perhubungan menemui beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah Kodefikasi pada bagian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum bisa mewakili semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan ini. Hal ini menyebabkan terjadinya perlambatan pekerjaan. Adapun untuk mengatasi hal tersebut, pihak Dinas Perhubungan sudah berkoordinasi dengan OPD terkait guna mempercepat proses penyelesaian permasalahan tersebut.</p> <p>Permasalahan kedua yaitu anggaran yang terbatas sehingga pekerjaan yang telah dijadwalkan dapat mengalami keterlambatan pengerjaan.</p>
--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Untuk pelaksanaan tugas operasionalnya tentunya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai Visi yang merupakan acuan/program/pandangan untuk mencapai tujuan. Adapun Visinya adalah :

“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang Dan Lingkungan”

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi

serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. BERTAQWA

Kehidupan masyarakat Banjarmasin senantiasa diwarnai nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur sebagai perwujudan masyarakat baiman, Harus mempunyai keyakinan bahwa semua agama bisa tumbuh dan hidup rukun di kota seribu sungai.

2. AMAN

Situasi kota yang aman dan tertib menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung berjalannya pembangunan kota, Masyarakat terjaga dari hal yang mengganggu ketentraman kehidupan, kondisi ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

3. INDAH

Banjarmasin lebih indah pada kualitas dan kuantitas visual dengan terwujudnya kota yang bersih dan nyaman melalui penataan kota yang baik serta sistem pengelolaan lingkungan dan ekosistem yang baik.

4. MAJU

Banjarmasin menjadi kota yang terus mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan ekonomi merata, meningkatkan kualitas melalui destinasi wisata, pengembangan dan peningkatan ekonomi mandiri, kesejahteraan masyarakat miskin, kesempatan kerja, WUB dan pengendalian inflasi

5. AMANAH

Pelayanan dengan landasan Amanah untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah kota dengan sikap perilaku dan keindahan keteladanan serta komitmen. Banjarmasin memiliki kinerja professional sesuai standar nasional dengan kualitas SDM dan pelayanan yang tinggi.

6. NYAMAN

Kota Banjarmasin yang menyegarkan dan menyehatkan kehidupan warga. Kenyamanan dan kemudahan urusan masyarakat akan terwujud dalam segala aspek kehidupan. Terus berkembang dengan meningkatnya Kerjasama pelaku pembangunan.

7. LEBIH BERMARTABAT

Pengembangan potensi & keunggulan kota Banjarmasin yaitu sungai martapura dan sebagai ibukota provinsi Kalimantan selatan memiliki fungsi sebagai kota industri, jasa dan perdagangan, memiliki akses ke provinsi lain. Memiliki infrastruktur berskala nasional & internasional.

Dalam usaha mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tersebut tentunya ada faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi capaian visi misi tersebut. Faktor tersebut bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dalam (internal).

A. Faktor Internal

- Masih kurangnya Sarana dan Prasarana jalan maupun di sungai.

- Anggaran yang belum maksimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang dikelola dengan baik.
- Masih ada beberapa sungai yang sulit untuk dilalui transportasi.
- Kurangnya SDM Perhubungan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Kondisi perlengkapan jalan yang belum memadai.

B. Faktor Eksternal

- Perkembangan penduduk diluar Kota Banjarmasin yang bekerja maupun beraktifitas di kota Banjarmasin akan menyebabkan perkembangan kendaraan bermotor yang cukup pesat.
- Kemacetan lalu lintas di Kota Banjarmasin yang semakin memprihatinkan terutama pada ruas-ruas jalan tertentu yang sudah mencapai indek tingkat pelayanan (ITP) E yang menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan mendekati macet total;
- Kondisi angkutan kota yang ada di Kota Banjarmasin cukup memprihatinkan.
- Pengelolaan transportasi sungai di Kota Banjarmasin yang semakin kecil.
- Kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
- Tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap tertib berlalu lintas yang masih kurang.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Banjarmasin untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah pada Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan. Pada misi IV, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan.

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan adalah :

1. Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan
2. Meningkatnya Konektivitas Kota
3. Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum
4. Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah Kementerian Perhubungan.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2021-2026, visi Kementerian Perhubungan adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dalam rangka mencapai visi tersebut; Kementerian Perhubungan merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu :

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.

Dari visi dan misi Kementerian Perhubungan, selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam periode 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021—2026

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I.	Tujuan Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan		
1.1	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas 2. Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas 3. Menurunkan titik/lokasi parkir liar serta pengoptimalan 4. pemasangan perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan 	Mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

1.2	Meningkatnya Konektifitas Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum 2. Peningkatan dan Penambahan Armada Angkutan Umum Trans Banjarmasin 3. Peningkatan Pelayanan Angkutan Melalui Pemberian Bimbingan Penyelenggaraan Pengangkutan 4. Melakukan Pengawasan Monitoring dan Pengendalian Terhadap Angkutan Jalan 	Meningkatkan Penggunaan Angkutan Umum Massal Trans Banjarmasin
1.3	Meningkatnya Layanan Sistem Transportasi Intermoda Darat dan Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai 2. Penyediaan Angkutan Sungai 3. Pengembangan Dermaga atau Pelabuhan Sungai Agar Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Kota Banjarmasin 4. Melakukan Pengawasan, Pengoperasian, dan Pengendalian Terhadap Angkutan Sungai 	Meningkatkan Penggunaan Angkutan Sungai yang Terintegrasi dengan Angkutan Darat
1.4	Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Dermaga/Pelabuhan Sungai Agar Memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan 2. Peningkatan Pelayanan Dermaga/Pelabuhan Sungai 3. Melakukan Pemeliharaan Rutin Dermaga Beserta Fasilitasnya dan Pembangunan Dermaga Beserta Fasilitasnya 	Mengoptimalkan dan Mengembangkan Dermaga/Pelabuhan Sungai
1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Program Kerja Dinas Perhubungan 2. Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan 	Menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tepat Waktu

Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, penataan, pengendalian manajemen lalu lintas jalan dan sungai;
2. Perumusan kebijakan teknis perbengkelan, terminal, parkir dan akreditasi uji kendaraan bermotor;
3. Penyelenggara, pengelola, memelihara serta pelaksana pengembangan dan peningkatan fungsi/manfaat sarana dan prasarana lalu lintas di jalan maupun di sungai;
4. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan dan di sungai;

5. Penyiapan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
6. Penyiapan, pelaksanaan, pelayanan kebutuhan dan kelayakan operasional angkutan barang, angkutan orang dan angkutan barang khusus baik di jalan maupun di sungai;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis perizinan dan pengembangan di bidang perhubungan; Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa point Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin yang mana Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait di dalamnya, yaitu :

1. Pembagunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
3. Pembangunan Halte
4. Pembangunan Dermaga
5. Pembangunan Shelter Air
6. Penyusunan rencana induk transportasi dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi sungai
 - b. Penyusunan revisi tatalog dan pembuatan masterplan
 - c. Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ
7. Rencana pengembangan sistem angkutan umum :
 - a. Pemenuhan 13 koridor Trans Banjarmasin
 - b. Penyediaan fasilitas pemberhentian angkutan
 - c. Integrasi intra dan antarmoda angkutan
 - d. Pengembangan aplikasi angkutan
 - e. Pembentukan BUMD angkutan
8. Manajemen dan rekayasa lalu lintas :
 - a. Mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.
 - b. Rencana penanganan parkir
 - Penyediaan dan pembangunan prasarana parkir
 - Pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on-street* di ruas jalan yang menimbulkan kemacetan
 - Pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas integrasi intra dan antar moda.
 - c. Pengaturan lalu lintas
 - d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
 - e. Pembangunan dan pengembangan *area traffic control system* (ATCS)
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan CCTV di jalan arteri
 - g. Penyelenggaraan hari bebas kendaraan / *car free day* (CFD)

Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberapa point di atas diantaranya adalah : keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk penyediaan prasarana bidang perhubungan dan keterbatasan anggaran belanja SKPD menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin diantaranya : bantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan bantuan dari BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Kalimantan Selatan

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dan dengan melakukan kegiatan hari bebas kendaraan (*car free day*).

Dinas Perhubungan memberi perhatian dalam upaya pencapaian indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, dengan mengoperasikan angkutan umum massal Trans Banjarmasin dalam rangka optimalisasi penggunaan moda angkutan umum massal serta menurunkan terjadinya kemacetan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Perkembangan transportasi perlu ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan – peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan hasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dilakukan penataan pada berbagai moda transportasi, perencanaan dan pengembangan yang juga perlu ditata dalam suatu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara satu dengan lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) perhubungan yang mumpuni untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

Belum optimalnya angkutan umum dan massal, faktor yang mempengaruhi fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, Dinas Perhubungan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarmasin pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur yang menunjang Kelestarian Lingkungan
2. Pembangunan Ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
3. Reformasi Birokrasi (Sistem dan aparatur) berbasis teknologi dan informasi (sistem daring/online dan smart governance) yang terintegrasi dengan supra sistemnya untuk mendukung kinerja tinggi sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Perhubungan melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah urusan pemerintahan bidang perhubungan mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan tercantum pada misi (keempat) yaitu **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan** Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan dengan sasaran;
 - Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan
 - Meningkatnya Konektivitas Kota
 - Meningkatnya Layanan Sistem Transportasi Intermoda Darat dan Sungai
 - Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD

Tabel TC.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan	Indikator tujuan A							
	a. Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	%	0	0	0	0	0	0
		Persentase Penurunan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%		0	0	0	0	0
	b. Meningkatnya Konektivitas Kota	Rasio Konektivitas Nasional	%	23,08%	38,46%	46,15%	53,85%	61,54%	69,23%
		Persentase Peningkatan Rasio Konektivitas Nasional	%		15,38%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	c. Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum	Persentase Dermaga Pelabuhan Sungai Yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Layanan Sistem transportasi Intermoda Darat dan Sungai	%		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
	d. Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	Jumlah Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan		1	1	1	1	1	1
		Persentase Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2	Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin			74,49 (BB)	74,60 (BB)	74,71 (BB)	74,82 (BB)	74,93 (BB)
	a. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Nilai LHE AKIP	%		0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2021 – 2026 melakukan strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan

Kebijakan yang akan dikembangkan untuk dapat mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah :

1. Pengoptimalan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas
2. Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas
3. Menurunkan titik/lokasi parkir liar serta pengoptimalan pemasangan perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan
4. Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum
5. Peningkatan dan Penambahan Armada Angkutan Umum Trans Banjarmasin
6. Peningkatan Pelayanan Angkutan Melalui Pemberian Bimbingan Penyelenggaraan Pengangkutan
7. Melakukan Pengawasan Monitoring dan Pengendalian Terhadap Angkutan Jalan
8. Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai
9. Penyediaan Angkutan Sungai
10. Pengembangan Dermaga atau Pelabuhan Sungai Agar Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Kota Banjarmasin
11. Melakukan Pengawasan, Pengoperasian, dan Pengendalian Terhadap Angkutan Sungai
12. Pengembangan Dermaga/Pelabuhan Sungai Agar Memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan
13. Peningkatan Pelayanan Dermaga/Pelabuhan Sungai
14. Melakukan Pemeliharaan Rutin Dermaga Beserta Fasilitasnya dan Pembangunan Dermaga Beserta Fasilitasnya
15. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Program Kerja Dinas Perhubungan
16. Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Banjarmasin Baiman & Lebih Bermartabat		
Misi IV	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	Mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengoptimalan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas
			Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas
		Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Menurunkan titik/lokasi parkir liar serta pengoptimalan pemasangan perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan
			Pembangunan/peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
	Meningkatnya Konektifitas Kota	Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum Massal	Penambahan dan Peningkatan SDM Pengujian Kendaraan Bermotor
			Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum
			Peningkatan dan Penambahan Armada Angkutan Umum
			Peningkatan Pelayanan Angkutan Melalui Pemberian Bimbingan Penyelenggaraan Pengangkutan
Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai	Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai yang	Melakukan Pengawasan Monitoring dan Pengendalian Terhadap Angkutan Jalan	
		Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai	
			Penyediaan Angkutan Sungai

yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum	Terintegrasi dengan Angkutan Darat	Pengembangan Dermaga atau Pelabuhan Sungai Agar Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Kota Banjarmasin
		Melakukan Pengawasan, Pengoperasian, dan Pengendalian Terhadap Angkutan Sungai
Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	Mengembangkan dan Mengoptimalkan Dermaga/Pelabuhan Sungai dan Fasilitasnya	Pengembangan Dermaga/Pelabuhan Sungai Agar Memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan
		Peningkatan Pelayanan Dermaga/Pelabuhan Sungai
		Melakukan Pemeliharaan Rutin Dermaga Beserta Fasilitasnya dan Pembangunan Dermaga Beserta Fasilitasnya
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD	Menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tepat Waktu	Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Program Kerja Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Rencana kegiatan tahun 2021 – 2026, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah menyusun rencana strategik yang nantinya akan ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk setiap tahunnya, adapun secara umum kegiatan terdiri 3 Program dan 17 kegiatan, yang meliputi :

Tabel TC. 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sarana	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku/daerah	Lokasi	Keterangan			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan	2.15.02	PROGRAM PERVELLIDGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Terciptanya ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Persentase kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) ijin laik jalan/jumlah KBWU yang memiliki ijin laik jalan (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase meningkatnya kenyamanan pengguna jasa angkutan (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Persentase Terperuhnya Penyelenggaraan LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	32.197.505.280	0	35.840.132.950	0	60.091.588.038	0	60.421.564.038	0	69.764.537.638	0	86.263.014.049	-	-	-	-	-	-	-	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	-	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-
				Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terperuhnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin	-	-	50%	500.000.000	28%	346.415.765	28%	90.329.741	-	-	206.027.257	-	-	232.986.703	100%	1.375.759.466	DISELEBIH	BANJARMASIN	MasterPlan Transportasi Kota Banjarmasin pd Tahun 2022	
		2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	500.000.000	2 Dokumen	346.415.765	2 Dokumen	90.329.741	2 Dokumen	206.027.257	2 Dokumen	232.986.703	10 Dokumen	1.142.772.763	DISELEBIH	BANJARMASIN					
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terperuhnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin	-	18.404.263.080	22.896.640.450	-	26.135.144.938	-	22.398.764.882	-	33.594.392.437	-	41.649.588.398	0%	165.078.794.185	DISELEBIH	BANJARMASIN	Indikator Smart City	Indikator Smart City			
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	14.769.790.080	17.600.000.450	1 Unit 296 ID Panel 160 Titik	21.169.852.306	1 Unit 296 ID Panel 160 Titik	18.216.497.854	1 Unit 296 ID Panel 160 Titik	27.422.227.878	1 Unit 296 ID Panel 160 Titik	34.111.583.203	4 Unit 1480 ID Panel 640 Titik	99.178.368.568	DISELEBIH	BANJARMASIN					
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Perbaikan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	-	3.634.473.000	4.196.640.000	2 Unit	3.810.573.415	2 Unit	3.278.969.614	2 Unit	4.936.001.018	2 Unit	6.140.084.977	8 Unit	19.856.657.047	DISELEBIH	BANJARMASIN					
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Perbaikan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	3.684.483.207	-	1.100.000.000	100 Unit	1.154.719.217	100 Unit	903.297.414	100 Unit	1.236.163.541	100 Unit	1.397.920.219	400 Unit	8.078.663.379	DISELEBIH	BANJARMASIN					
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi	1.461.624.000	170.217.200	937.380.000	-	4.272.461.102	-	15.356.056.042	-	659.287.222	-	745.557.450	-	23.602.583.015	DISELEBIH	BANJARMASIN	Untuk Pembangunan Terminal Tipe C				
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	700.000.000	1 Dokumen	115.471.922	1 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	815.471.922	-	-	DISELEBIH	BANJARMASIN	2022 DED dan Dokumen lain				

	2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun						1 Unit	3.849.064.056	1 Unit	15.054.956.904					2 Unit	18.904.020.960	DESHEB	BAKARMAKIN	2022 Pembebasan Lahan dan 2024 Pembangunan Fisik
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	730.812.000					1 Unit		1 Unit		1 Unit	1 Unit	93.194.681	5 Unit		881.823.457	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	730.812.000	170.217.200		237.380.000		1 Unit	269.434.484	1 Unit	270.989.224	1 Unit	1 Unit	576.876.319	6 Unit	652.362.769	2.255.709.227	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin dan Tereleengarannya Fasilitas Parkir	2.360.786.000	4.342.577.000		1.281.000.000			1.154.719.217		903.297.414			1.236.163.541		1.397.920.219	11.278.543.172	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.360.786.000	4.342.577.000	900 Laporan	1.281.000.000	900 Laporan	1.154.719.217	900 Laporan	903.297.414	900 Laporan	1.236.163.541	900 Laporan	1.397.920.219	4500 Laporan		9.466.577.000	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.06	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diuji	4.527.595.700	98% 98%	803.250.000	1.006.134.000	98% 98%	5.966.049.286	98% 98%	1.595.825.432	98% 98%	2.348.710.727	98% 98%	2.697.253.867	98% 98%		18.944.819.012	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4.527.595.700	1 Unit	803.250.000	1 Unit	1.006.134.000	1 Unit	3.926.045.337	1 Unit	481.758.621	1 Unit	782.903.576	1 Unit	885.349.472	6 Unit	11.527.687.234	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan						24 Orang	92.377.537	24 Orang	60.219.828	24 Orang	82.410.903	24 Orang	93.194.681	96 Orang	235.008.268	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar						11700 Unit	76.981.281	11700 Unit	30.109.914	11700 Unit	41.205.451	11700 Unit	46.597.341	46800 Unit	148.296.646	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Ikhtis Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Ikhtis Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						23400 Dokumen	230.943.843	23400 Dokumen	150.549.569	23400 Dokumen	206.027.257	23400 Dokumen	232.986.703	93600 Dokumen	587.520.669	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						4800 Laporan	115.471.922	4800 Laporan	60.219.828	4800 Laporan	41.205.451	4800 Laporan	46.597.341	19200 Dokumen	216.897.201	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						120 Laporan	153.962.562	120 Laporan	60.219.828	120 Laporan	41.205.451	120 Laporan	41.205.451	480 Laporan	255.387.841	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						1 Unit	731.322.171	1 Unit	361.318.966	1 Unit	576.876.319	1 Unit	698.960.109	4 Unit	1.669.517.455	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						20 Laporan	100.075.665	20 Laporan	30.109.914	20 Laporan	82.410.903	20 Laporan	93.194.681	80 Laporan	212.596.482	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						20 Laporan	76.981.281							20 Laporan	76.981.281	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						20 Laporan	461.887.687	20 Laporan	361.318.966	20 Laporan	494.465.416	20 Laporan	559.168.087	80 Laporan	1.317.672.069	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi	18.051.229.206		2.539.030.000	5.146.200.000		8.414.054.026		7.906.863.366		12.641.832.476		16.169.277.196			70.868.486.270	DESHEB	BAKARMAKIN	Indikator Smart City Indikator Smart City

	2.15.02.2.06.01	Pemetaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	125.785.000		512.430.000	672.000.000		3 Laporan	600.453.993	3 Laporan	511.868.535	3 Laporan	782.903.576	3 Laporan	885.349.472	12 Laporan	23.803.250.001	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.988.669.206		2.026.600.000	875.600.000		120 Unit	2.848.307.401	120 Unit	3.041.101.295	120 Unit	5.233.092.322	120 Unit	7.129.393.115	480 Unit	23.803.250.001	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	66.890.000					10 Dokumen	538.868.968	10 Dokumen	463.692.673	10 Dokumen	716.974.854	10 Dokumen	810.793.727	40 Dokumen	23.803.250.001	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	14.869.885.000			3.598.600.000		12 Laporan	4.387.933.024	12 Laporan	3.854.068.967	12 Laporan	5.851.174.093	12 Laporan	7.269.185.137	60 Laporan	23.803.250.001	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						9 Laporan	38.490.641	9 Laporan	36.131.897	9 Laporan	57.687.632	9 Laporan	74.555.745	36 Laporan	206.865.914	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin				250.000.000			215.547.587		18.065.948		313.161.430		27.958.404		824.733.370	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Disetujui				250.000.000		4 Dokumen	192.453.203			4 Dokumen	288.438.159			12 Dokumen	730.891.362	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						10 Laporan	15.396.256	10 Laporan	12.043.966	10 Laporan	16.482.181	10 Laporan	18.638.936	40 Dokumen	43.922.402	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi						10 Laporan	7.698.128	10 Laporan	6.021.983	10 Laporan	8.241.090	10 Laporan	9.319.468	40 Dokumen	21.961.201	DESHEB	BAKARMAKIN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Rasio Konktivitas Kota	8.367.239.502	3 Treyek	5.938.168.000	3.822.778.500	1 Treyek	13.587.196.117	1 Treyek	12.152.361.213	1 Treyek	18.764.962.548	1 Treyek	23.342.471.812	9 Treyek		85.975.177.691	DESHEB	BAKARMAKIN	

		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	98.515.000	1 PAKET	115.220.000	1 Paket	97.927.003	1 Paket	119.871.030	1 Paket	119.298.767	1 Paket	152.309.040	4 Paket	550.831.800	DESHEB	BAKALARAASIN
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2500 Lembar		41.175.000	2500 lembar	20.000.000	1 Paket	15.668.320	1 Paket	19.179.365	1 Paket	19.087.803	1 Paket	24.369.446	4 Paket	115.110.488	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Biscan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Biscan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	800 Eksemplar		8.500.000	800 eksemplar	8.700.000	4 Dokumen	9.400.992	4 Dokumen	11.507.619	4 Dokumen	11.452.682	4 Dokumen	14.621.668	16 Dokumen	49.561.293	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3400 Orang		160.200.000	1920 Orang		12 Laporan	75.207.938	12 Laporan	83.691.774	12 Laporan	75.720.209	12 Laporan	87.883.804	48 Laporan	394.819.921	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Orang		2.723.054.192	100 Orang	560.653.569	12 Laporan	470.049.613	12 Laporan	575.380.946	12 Laporan	572.634.081	12 Laporan	731.083.390	48 Laporan	5.562.425.970	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-		3.721.226.103		465.218.479		430.371.870		511.590.262		5.128.406.714	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						20 Buah 20 Buah	14.243.928	20 Buah 20 Buah	17.435.786	20 Buah 20 Buah	17.352.548	20 Buah 20 Buah	22.154.042	80 Buah 80 Buah	49.032.262	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						3 Unit	74.780.620	3 Unit	83.216.253	3 Unit	75.289.981	3 Unit	87.384.464	12 Unit	233.286.853	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit	3.560.981.916	2 Unit	277.387.509	2 Unit	250.966.602	2 Unit	291.281.546	14 Paket	4.089.336.027	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	35.609.819	1 Unit	43.589.466	1 Unit	43.381.370	1 Unit	55.385.105	4 Paket	122.580.655	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	35.609.819	1 Unit	43.589.466	1 Unit	43.381.370	1 Unit	55.385.105	4 Paket	122.580.655	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.019.860.000	100%	1.022.060.000	100%	849.928.042	100%	1.040.384.648	100%	1.035.417.858	100%	1.321.920.617		6.289.571.165	DESHEB	BAKALARAASIN
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan		742.800.000	12 Bulan	745.000.000	12 Laporan	583.644.936	12 Laporan	714.431.342	12 Laporan	711.020.651	12 Laporan	907.761.876	60 Laporan	3.496.896.929	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	4.881.883.471	277.060.000	13 Bulan	277.060.000	13 Laporan	266.283.106	13 Laporan	325.953.306	13 Laporan	324.397.207	13 Laporan	414.158.741	65 Laporan	6.352.637.090	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	897.934.000	100%	1.067.741.860	100%	1.431.514.730	100%	1.728.520.446	100%	1.698.757.077	100%	2.143.840.499		8.968.308.612	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			500.000.000	7 Unit	500.000.000	7 Unit	391.708.011	7 Unit	479.484.122	7 Unit	477.195.068	7 Unit	609.236.159	35 Unit	1.848.387.200	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	7 Unit		897.934.000	30 Unit	400.000.000	30 Unit	587.562.016	30 Unit	719.226.183	30 Unit	715.792.602	30 Unit	913.854.238	120 Unit	3.320.514.801	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						20 Unit	7.121.964	20 Unit	8.717.893	20 Unit	8.676.274	20 Unit	11.077.021	80 Unit	24.516.131	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						130 Unit	35.609.819	130 Unit	43.589.466	130 Unit	43.381.370	130 Unit	55.385.105	520 Unit	122.580.655	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.689.042.000			167.741.860	2 Unit	195.854.005	2 Unit	239.742.061	2 Unit	238.597.534	2 Unit	304.618.079	12 Unit	2.530.977.460	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3.502.137.465				3 Unit	142.439.277	3 Unit	158.507.148	3 Unit	143.409.487	3 Unit	166.446.598	12 Unit	3.946.493.376	DESHEB	BAKALARAASIN
		2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	71.219.638	1 Unit	79.253.574	1 Unit	71.704.743	1 Unit	83.223.299	4 Unit	222.177.956	DESHEB	BAKALARAASIN
		Total				48.946.468.699		56.545.490.879		97.711.241.906		98.204.917.906		107.373.461.506		129.078.314.917					

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk memberikan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maka diperlukan sebuah inidkator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lima tahun mendatang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun 2021- 2026					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Meningkatnya Konektifitas Kota	Rasio Konektifitas Kota		0,38	0,46	0,54	0,62	0,69
					0,15	0,08	0,08	0,08	0,08
		Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum	Jumlah Layanan Sistem Transportasi Intermoda Darat dan Sungai		3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
					0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	Jumlah Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan		4,00	5,00	6,00	6,00	6,00		
			0,17	0,17	0,17	0,00	0,00		
2	Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin		74,49 (BB)	74,60 (BB)	74,71 (BB)	74,82 (BB)	74,93 (BB)
			Persentase Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin		0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%

BAB VIII PENUTUP

Terselesaikannya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026 adalah untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota Banjarmasin yang dituangkan kedalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Terwujudnya Visi dan Misi tersebut yang diaplikasikan ke dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan mewujudkan pelayanan prima dari segi pelayanan jasa perhubungan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin periode 2021 – 2026 diharapkan seluruh komponen yang terkait untuk saling mendukung dan bekerjasama.

**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARMASIN**



**H. SLAMET BEGJO, A.TD, MT
Pembina
NIP. 19670119 199203 1 006**